

**RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN DAERAH
(RKPD)
TAHUN 2022**



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita Panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan berkat dan rahmat-Nyalah maka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022 dapat diselesaikan. Penyusunan dokumen Rencana Kerja ini merupakan salah satu kewajiban untuk merencanakan program dan kegiatan guna mencapai tujuan dalam menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*), efektif, efisien, bersih dan responsif serta akuntabel.

Rencana kerja tahun 2022 ini disusun dengan memperhatikan tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu dan pencapaian target kinerja yang diharapkan. Rencana Kerja ini juga merupakan upaya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mendukung visi Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu terpilih tahun 2021-2026 yaitu ***“Menuju Kapuas Hulu yang Harmonis, Energik, Berdaya saing, Amanah dan Terampil (HEBAT)”***, dengan didukung beberapa Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat Kapuas Hulu yang harmonis dalam kerukunan kehidupan beragama, budaya dan keamanan;
2. Mewujudkan Kapuas Hulu yang kreatif menuju desa mandiri, pengembangan aktifitas ekonomi yang adil dan pro rakyat, serta ramah investasi;
3. Mewujudkan masyarakat Kapuas Hulu yang berbudaya, mandiri, cerdas dan inovatif dalam meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan yang memiliki daya saing;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, berwibawa dan tersedianya infrastruktur publik yang berbasis transparansi, responsibilitas dan akuntabilitas,

5. Mewujudkan Kapuas Hulu yang sejahtera dalam pelayanan kesehatan dasar yang bermutu bagi masyarakat.

Merealisasikan perencanaan yang telah disusun tentu tidak lepas dari dukungan semua pihak terkait. Upaya pembenahan sistem, pengembangan SDM dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan sesuai tuntutan tugas dan harapan masyarakat merupakan suatu tugas besar yang harus segera direalisasikan. Untuk itu, dukungan semua pihak dalam perbaikan sistem dan kinerja DPMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu akan sangat diperlukan demi terwujudnya akuntabilitas kinerja, kualitas pelayanan yang lebih baik dan meningkatnya realisasi investasi di daerah.

Renawal Rencana Kerja ini merupakan dokumen yang dinamis sehingga memungkinkan untuk dilakukan perubahan-perubahan dan perbaikan-perbaikan yang dianggap strategis dan sejalan dengan perkembangan pembangunan daerah.

Putussibau, Oktober 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu,



DIDIK WIDIYANTO, S.Sos.,M.AP

Pembina Utama Muda

NIP. 19710312 199101 1 001

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| KATA PENGANTAR..... | i |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2. Landasan Hukum | 2 |
| 1.3. Maksud dan Tujuan | 4 |
| 1.4. Sistematika Penulisan | 5 |
| BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 | 7 |
| 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah | 7 |
| 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah | 18 |
| 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.. | 21 |
| 2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD | 22 |
| 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat | 32 |
| BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH..... | 33 |
| 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional..... | 33 |
| 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 35 |
| 3.3. Program dan Kegiatan | 38 |
| BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... | 45 |
| BAB V PENUTUP | 63 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Pusat dan Daerah yang mengamanatkan tentang penyusunan rencana kerja satuan kerja perangkat daerah sebagai perencanaan tahunan dan menjadi dasar penyusunan rencana kerja anggaran perangkat daerah. Dokumen Renja mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan pembangunan jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Rencana Kerja perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah yang berisi program-program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam kurun waktu satu tahun berjalan. Di dalamnya juga memuat kebijakan, permasalahan-permasalahan yang belum dapat diselesaikan dan program-program serta kegiatan sebagai penjabaran RPJMD dan Renstra DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu 2021-2026 .

Dengan disusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), diharapkan dapat lebih menjamin konsistensi perencanaan dan juga sebagai pedoman pelaksanaan program pembangunan secara berkesinambungan dan sinergi dengan program-program OPD lainnya.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 27 tahun 1959 tentang tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Negara Nomor 352);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);

11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 05 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2028;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011 - 2031;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014-2034;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu No. 20 Tahun 2015 tentang Penetapan Kabupaten Kapuas Hulu Sebagai Kabupaten Konservasi;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2022 ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022. Sedangkan tujuan dari Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021-2026;
- b. Merumuskan program dan kegiatan prioritas sebagai tindak lanjut dari permasalahan yang terjadi pada tahun lalu dan yang akan terjadi pada tahun mendatang;
- c. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mendukung program Pemerintah Daerah;
- d. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
- e. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;
- f. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat, serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran kegiatan.
- g. Untuk memberikan arah serta sebagai pedoman dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2022.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan penyajian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Kegiatan evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2020 ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu serta hambatan dan permasalahan yang terjadi.

Pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat dari laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Sedangkan laporan keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Anggaran Tahun 2020 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu dengan penyerapan anggaran dinas yang ditargetkan 95% sampai dengan triwulan IV terealisasi sebesar 98,52% atau sebesar Rp. 3.378.224.448,00 (*tiga milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah*) dari total anggaran dinas sebesar Rp. 3.428.834.300, 00 (*tiga milyar empat ratus dua puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus rupiah*), dengan total

realisasi belanja langsung sebesar Rp. 1.516.094.198,00 (*satu milyar lima ratus enam belas juta sembilan puluh empat ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah*) atau sebesar 99,61% dari total anggaran belanja langsung sebesar Rp. 1.522.018.300,00 (*satu milyar lima ratus dua puluh dua juta delapan belas ribu tiga ratus rupiah*) ,sedangkan realisasi belanja tidak langsung adalah sebesar Rp. 1.862.130.250,00 (*satu milyar delapan ratus enam puluh dua juta serratus tiga puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah*) atau 97,66% dari total anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.906.816.000,00 (*satu milyar sembilan ratus enam juta delapan ratus enam belas ribu rupiah*).

Realisasi anggaran tersebut mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun sebelumnya yang hanya sebesar 96,81% dari total alokasi anggaran yang tersedia. Hal ini menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun DPMPSTSP Kab. Kapuas Hulu senantiasa berusaha untuk melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga seluruh anggaran dapat terserap maksimal.

Realisasi kegiatan yang telah dilaksanakan di tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam perjanjian kinerja DPMPSTSP Kab. Kapuas Hulu, adalah sebagai berikut :

1. Hasil pelaksanaan kegiatan pada Bagian Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dijabarkan sebagai berikut :
 - a. Sasaran meningkatnya kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sudah terrealisasi dengan telah disampaikannya hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kab. Kapuas Hulu dengan nilai “BB” . Adapun nilai evaluasi pelayanan publik oleh Ombudsman di tahun 2020 tidak dilakukan penilaian. Penilaian dilakukan kembali di tahun 2021 melalui pengisian kuisioner secara daring dan kunjungan langsung oleh Ombudsman.

- b. Sasaran meningkatnya sarana dan prasarana aparatur dengan indikator kinerja prosentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik yang ditargetkan 90% sampai dengan akhir tahun 2020 ini terealisasi dengan prosentase 92% (baik).
 - c. Sasaran meningkatnya disiplin aparatur dengan indikator kinerja prosentase kehadiran pegawai dalam 1 tahun yang ditargetkan 92,5% di triwulan IV terrealisasi 100%. Realisasi kehadiran pegawai dalam 1 tahun ini harus dipertahankan dan ditingkatkan agar jangan sampai menurun di tahun-tahun berikutnya.
 - d. Sasaran meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan indikator kinerja nilai LAKIP OPD belum dilakukan penyusunan, namun diharapkan dapat diselesaikan tepat waktu. Sedangkan penyerapan anggaran dinas yang ditargetkan 95% sampai dengan triwulan IV dapat terrealisasi sebesar 98,52% atau berhasil memenuhi target kinerja.
 - e. Memastikan segala sarana prasarana kerja dan keperluan rutin Dinas dalam keadaan baik dan terpenuhi segala kebutuhan rutin Dinas merupakan tugas pokok yang harus dijalankan pada Bagian Sekretariat.
2. Hasil pelaksanaan kegiatan pada Bidang Penanaman Modal dapat dilaporkan sebagai berikut :
- a. Untuk kegiatan Pemantauan ,Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal, hasil yang dicapai yaitu melaksanakan kegiatan pengendalian penanaman modal dengan indikator jumlah perusahaan yang dilakukan pemantauan, pembinaan dan pengawasan terlaksana dengan jumlah perusahaan sebanyak 65 perusahaan, atau melampaui target yang sudah ditetapkan.

- b. Pada kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi Daerah, meskipun tidak dapat merealisasikan keikutsertaan pada kegiatan pameran promosi penanaman modal dikarenakan pandemi yang sedang terjadi, namun berhasil merealisasikan minat investor yang berencana untuk berinvestasi di Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 1 (satu) minat.
 - c. Kegiatan Pengelolaan SIPID merupakan upaya untuk menyajikan data dan informasi potensi dan peluang investasi daerah secara terpadu, lengkap dan akurat kepada publik, khususnya calon investor. Dengan memberikan informasi yang diperlukan oleh calon investor ini, mereka dapat menentukan pilihan dari berbagai alternative peluang investasi yang ada melalui aplikasi SIPID.
 - d. Mengikuti kegiatan Rakornas Investasi yang merupakan kegiatan Koordinasi Teknis Perencanaan yang berkaitan dengan perencanaan dan pengembangan penanaman modal Nasional. Pada tahun 2020 ini kegiatan rapat koordinasi yang diikuti hanya di tingkat Nasional mengingat pandemi Covid-19 yang sedang terjadi di Indonesia.
3. Adapun laporan pelaksanaan kegiatan dari Bidang Pelayanan dan Informasi Penanaman Modal adalah sebagai berikut :
- a. Sasaran meningkatnya pelayanan perizinan dan non perizinan dengan indikator kinerja rata-rata waktu penyelesaian perizinan dan non perizinan yang ditargetkan 3-5 hari sudah terealisasi 100%. Realisasi rata-rata waktu penyelesaian perizinan dan non perizinan ini harus dipertahankan dan ditingkatkan sehingga di tahun-tahun berikutnya tidak terjadi penurunan dan tetap terealisasi 100%.
 - b. Sasaran meningkatkan kualitas pelayanan yang diselenggarakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kapuas Hulu dengan

indikator kinerja nilai SKM yang ditargetkan 79 (Baik) terealisasi dengan nilai 87,78 (Baik). Realisasi nilai SKM ini berasal dari total 118 responden sebagai sampel yang merupakan pengunjung DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu, dimana maksud kunjungan mereka untuk mendapatkan layanan perizinan dan non perizinan.

- c. Jumlah izin tervalidasi melalui aplikasi OSS dan SiCantik selama tahun 2020 sebanyak 701 izin dengan nilai realisasi investasi sebesar Rp. 81.033.824.000,00 (*delapan puluh satu milyar tiga puluh tiga juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah*). Nilai realisasi ini terutama berasal dari 14 sektor PMDN dimana penerbitan izinnya dikelola oleh DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu. Termasuk didalamnya 9 izin mendirikan bangunan (IMB) yang baru mulai bulan Oktober 2020 penerbitan izinnya dikelola oleh DPMPTSP.

Adapun repaitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.1

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020
Kabupaten Kapuas Hulu**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

| Kode | Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|---|-----|------|-----|-----|------|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 | Tingkat Realisasi (%) | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 = (5+7+9) | 11 | | | | | |
| | Urusan | | | | | | | | | | | | | | |
| | Bidang Urusan | | | | | | | | | | | | | | |
| | PENANAMAN MODAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 02 | 12 | 01 | 01 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | | | | |
| | | | | | Kegiatan : | | | | | | | | | | |
| 1 | 02 | 12 | 01 | 01 | 001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah materai / perangko | 300 | 200 | 200 | 200 | 100% | 200 | 600 | 100% |
| 1 | 02 | 12 | 01 | 01 | 002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah bulan | 12 | 12 | 12 | 12 | 100% | 12 | 48 | 100% |
| 1 | 02 | 12 | 01 | 01 | 006 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional | Jumlah kendaraan dinas yang dibayarkan pajak / Tahun | 18 | 11 | 11 | 11 | 100% | 12 | 12 | 100% |
| 1 | 02 | 12 | 01 | 01 | 007 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Jumlah Orang yang dibayar honorarium pengelola keuangan dan jasa operator | 16 | 16 | 16 | 16 | 100% | 16 | 96 | 100% |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan | |
|-------------------|--|---|--|--|---|--|-----------------------------|---|--|--|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2021) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 = (5+7+9) | 11 |
| 1 02 12 01 01 008 | Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Lingkungan Kantor | Jumlah bulan pemeliharaan lingkungan gedung kantor | 12 | 12 | 12 | 12 | 100% | 12 | 48 | 100% |
| 1 02 12 01 01 009 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah peralatan kantor yang dipelihara / perbaiki | 30 | 17 | 17 | 17 | 100% | 17 | 68 | 100% |
| 1 02 12 01 01 010 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah item alat tulis kantor | 50 | 50 | 50 | 50 | 100% | 50 | 200 | 100% |
| 1 02 12 01 01 011 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah item barang cetak dan pengadaan | 8 | 8 | 8 | 8 | 100% | 8 | 32 | 100% |
| 1 02 12 01 01 012 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen instalasi listrik | 75 | 75 | 75 | 75 | 100% | 75 | 225 | 100% |
| 1 02 12 01 01 015 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Jumlah langganan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan | 7 | 7 | 7 | 7 | 100% | 7 | 28 | 100% |
| 1 02 12 01 01 017 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah makanan dan minuman harian dan rapat kantor | 4.720 | 6.163 | 6.163 | 6.163 | 100% | 6.163 | 18.489 | 100% |
| 1 02 12 01 01 018 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Jumlah paket rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | 44 | 45 | 45 | 45 | 100% | 50 | 180 | 100% |
| 1 02 12 01 01 019 | Rapat-rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah | Jumlah Paket rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah | 42 | 42 | 42 | 42 | 100% | 45 | 129 | 100% |
| 1 02 12 01 01 022 | Pengelolaan kearsipan di lingkungan SKPD | Jumlah paket kearsipan yang dikelola | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 4 | 100% |
| 1 02 12 01 01 026 | Penyediaan administrasi pengadaan barang dan jasa | Jumlah orang yang bayar honorarium | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% | 5 | 12 | 100% |

| Kode | | | | | | Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019 | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan | |
|------|----|----|----|----|-----|---|--|--|---|--|---|-----------------------|---|--|--|
| | | | | | | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2021) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 = (5+7+9) | 11 |
| 1 | 02 | 12 | 01 | 01 | 027 | Peaksanaan administrasi kepegawaian di lingkungan SKPD | Jumlah dokumen | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% |
| 1 | 02 | 12 | 01 | 01 | 031 | Penyusunan RKA, DPA dan DPPA | Jumlah dokumen | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% | 3 | 12 | 100% |
| 1 | 02 | 12 | 01 | 01 | 036 | Penyediaan Jasa Pendukung perkantoran | Jumlah pegawai honorer yang dibayarkan honorarium | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% | 5 | 12 | 100% |
| 1 | 02 | 12 | 01 | 01 | 042 | Monitoring dan evaluasi kegiatan dinas | Jumlah paket monev | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 4 | 12 | 100% |
| 1 | 02 | 12 | 01 | 02 | | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | | | | | |
| | | | | | | Kegiatan : | | | | | | | | | |
| 1 | 02 | 12 | 01 | 02 | 05 | Pengadaan kendaraan dinas/opersional | Jumlah kendaraan dinas /operasional yang diadakan | 12 | 3 | 3 | 3 | 25% | 0 | 3 | 25% |
| 1 | 02 | 12 | 01 | 02 | 09 | Penyediaan sarana pendukung kantor | Jumlah paket penyediaan sarana pendukung kantor | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% |
| 1 | 02 | 12 | 01 | 02 | 024 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara | 12 | 12 | 12 | 12 | 100% | 2 | 12 | 100% |
| 1 | 02 | 12 | 01 | 03 | | Peningkatan Disiplin Aparatur | | | | | | | | | |
| | | | | | | Kegiatan : | | | | | | | | | |
| 1 | 02 | 12 | 01 | 03 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas dan perlengkapannya | Jumlah pakaian dinas | 27 | 27 | - | - | 100% | 30 | 87 | 100% |
| 1 | 02 | 12 | 01 | 03 | 05 | Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu | Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu | 27 | - | 27 | 27 | 100% | - | 57 | 100% |
| 1 | 02 | 12 | 01 | 05 | | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | | |

| Kode | | | | | | Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan | |
|------|----|----|----|----|-----|--|--|--|--|---|--|-----------------------------|---|---|--|
| | | | | | | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2021) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 = (5+7+9) | 11 |
| 1 | 16 | 02 | 01 | 05 | 001 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal | 16 | 16 | 16 | 16 | 100% | 12 | 64 | 100% |
| 1 | 02 | 12 | 01 | 06 | | Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | | | | | | | |
| | | | | | | Kegiatan : | | | | | | | | | |
| 1 | 02 | 12 | 01 | 06 | 001 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar relaisasi kinerja | Jumlah dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 4 | 100% |
| 1 | 02 | 12 | 01 | 06 | 002 | Penyusunan pelaporan Keuangan Semesteran SKPD dan prognosis realisasi anggaran | Jumlah dokumen | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | 2 | 8 | 100% |
| 1 | 02 | 12 | 01 | 06 | 004 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | Jumlah dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 4 | 100% |
| 1 | 02 | 12 | 01 | 06 | 016 | Penyusunan standar operasional prosedur (SOP) SKPD | Jumlah dokumen | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 | 40 | 100% |
| 1 | 02 | 12 | 01 | 06 | 026 | Pendataan dan pengelolaan aset SKPD | Jumlah dokumen | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | 2 | 8 | 100% |
| 1 | 02 | 12 | 01 | 06 | 030 | Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahunan SKPD | Jumlah dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 4 | 100% |
| 1 | 02 | 12 | 01 | 06 | 036 | Penyusunan Rencana Kerja SKPD | Jumlah dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 4 | 100% |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan | |
|----------------------|--|--|--|--|---|--|-----------------------------|---|--|---|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2021) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 = (5+7+9) | 11 |
| 1 02 12 01 06 042 | Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Jumlah dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 4 | 100% |
| 1 02 12 01 06 047 | Penyusunan laporan tahunan | Jumlah dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 4 | 100% |
| 1 02 12 01 06 048 | Penyusunan laporan reformasi birokrasi | Jumlah dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 4 | 100% |
| 1 02 12 01 15 | Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi | | | | | | | | | |
| | Kegiatan : | | | | | | | | | |
| 1 02 12 01 15 013 | Penyelenggaraan Pameran Investasi Daerah | Jumlah event pameran yang diikuti | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | 2 | 8 | 100% |
| 1 02 12 01 15 015 | Pengelolaan sistem informasi potensi investasi daerah (SIPID) | Jumlah kegiatan up date data | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | 2 | 8 | 100% |
| 1 02 12 01 15 019 | Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal | Jumlah perusahaan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan | 45 | 45 | 45 | 45 | 100% | 45 | 180 | 100% |
| 1 02 12 01 16 | Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi | | | | | | | | | |
| | Kegiatan : | | | | | | | | | |
| 1 02 12 01 16 013 | Sosialisasi Peraturan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kab. Kapuas Hulu | Jumlah Kecamatan yang mendapatkan sosialisasi | 6 | 6 | - | - | 100% | - | 6 | 100% |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan | | | | | | |
|------|--|--|--|--|---|--|--|---|--|--|---|------|---|----|------|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2021) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 = (5+7+9) | 11 | | | | | |
| 1 | 02 | 12 | 01 | 16 | 020 | Rapat koordinasi teknis perencanaan dan pengembangan penanaman modal | Jumlah paket rapat teknis perencanaan dan pengembangan penanaman modal | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% | 3 | 12 | 100% |
| 1 | 02 | 12 | 01 | 16 | 019 | Penyusunan Peta Potensi Investasi Daerah Kab. Kapuas Hulu | Jumlah dokumen | - | 1 | - | - | 100% | - | 1 | 100% |
| 1 | 02 | 12 | 01 | 16 | 021 | Penyusunan ICOR Kab. Kapuas Hulu | Jumlah dokumen | - | - | 1 | 1 | 100% | - | 1 | 100% |
| 1 | 02 | 12 | 01 | 19 | | Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan | | | | | | | | | |
| | | | | | | Kegiatan : | | | | | | | | | |
| 1 | 02 | 12 | 01 | 19 | 001 | Pengawasan dan Pengendalian Perizinan dan Non Perizinan | Jumlah Kecamatan yang dilakukan pengawasan | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% | 4 | 12 | 100% |
| 1 | 02 | 12 | 01 | 19 | 013 | Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) | Jumlah laporan | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 4 | 100% |
| 1 | 02 | 12 | 01 | 19 | 014 | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Keliling | Jumlah Kecamatan yang mendapatkan pelayanan keliling | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 4 | 100% |
| 1 | 02 | 12 | 01 | 19 | 017 | Penataan perizinan | Jumlah dokumen | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% | 3 | 12 | 100% |
| 1 | 02 | 12 | 01 | 19 | 019 | Publikasi dan informasi perizinan dan non perizinan | Jumlah publikasi | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | 2 | 8 | 100% |
| 1 | 02 | 12 | 01 | 19 | 020 | Penyusunan laporan perkembangan PTSP Kabupaten | Jumlah laporan | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 4 | 100% |

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi : membina, mengkoordinasikan, merencanakan serta menetapkan program kerja, tata kerja dan pengembangan semua kegiatan di bidang penanaman modal dan perizinan serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. Pelaksana urusan pemerintah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. Pelaksana evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

Adapun pencapaian kinerja maupun hal-hal yang menjadi kekuatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu adalah :

1. Adanya peningkatan disiplin dan kinerja;
2. Adanya upaya peningkatan pelaksanaan penataan peraturan perundang-undangan;
3. Adanya upaya pelaksanaan pengidentifikasian terhadap tumpang tindihnya tugas dan fungsi, sehingga terjadi peningkatan efisiensi dan efektivitas kinerja;
4. Adanya standar pelayanan sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan terukur serta

berkepastian dan transparan;

5. Manajemen Sumber Daya Manusia dilakukan secara obyektif, adil, transparan dan akuntabel;
6. Budaya dan tingkat akuntabilitas kinerja birokrasi semakin meningkat;
7. Penyampaian pelaporan LHKPN dan LHKASN yang tertib;
8. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam menunjang kegiatan semakin meningkat, sehingga proses birokrasi menjadi lebih efisien, efektif dan transparan serta memberi kemudahan bagi pemangku kepentingan dan masyarakat untuk mendapatkan dan mengakses informasi.

Beberapa permasalahan pada DPMPSTSP Kabupaten Kapuas Hulu yang masih memerlukan penyelesaian lebih lanjut, diantaranya :

- 1) belum memadainya fasilitas dan sarana prasarana pelayanan dan perkantoran;
- 2) terbatasnya alokasi anggaran yang tersedia;
- 3) terbatasnya tenaga teknis untuk pelayanan perizinan dan non perizinan;
- 4) belum maksimalnya penerapan standar pelayanan minimal bidang pelayanan perizinan dan non perizinan.

Penyelesaian terhadap permasalahan tersebut diharapkan akan memberikan dampak pada peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat serta meningkatkan nilai investasi di daerah.

Sedangkan pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu, dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kapuas Hulu

| No | Indikator | SPM / Standar Nasional | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Analisis |
|-----|--|------------------------------|-----|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
| | | | | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1. | Predikat SAKIP | | | CC | B | B | BB | BB | BB | BB | A | |
| 2. | Nilai Survei Kepuasan Masyarakat | | | 77 | 78 | 79 | 80 | 83,71 | 85,32 | 79 | 80 | |
| 3. | Nilai realisasi investasi PMDAN (Milyar rupiah) | | | 173 | 226 | 299 | 398 | 607.50 | 546,57 | 398 | 398 | |

Berdasarkan tabel di atas, dapat dianalisa sebagai berikut :

- a) Sasaran meningkatkan akuntabilitas kinerja pada Renstra DPMPSTSP Kabupaten Kapuas Hulu, dengan indikator kinerja predikat SAKIP “B”, terealisasi dengan predikat “BB” untuk penilaian kinerja tahun 2018. Penilaian SAKIP DPMPSTSP tahun 2020 terealisasi dengan predikat “BB” dengan poin 78,19.
- b) Sasaran meningkatkan kualitas pelayanan yang diselenggarakan DPMPSTSP Kabupaten Kapuas Hulu dengan indikator kinerja nilai survei kepuasan masyarakat (SKM) yang ditargetkan dengan nilai 79 (baik), terealisasi dengan nilai 85,32 (baik) dengan jumlah responden sebanyak 118 orang responden.
- c) Sasaran meningkatkan realisasi investasi di daerah dengan indikator kinerja realisasi investasi yang ditargetkan sebesar 299 Milyar terealisasi sebesar 546,57 Milyar atau sebesar 183%. Nilai realisasi investasi tersebut berasal dari izin tervalidasi OSS dan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) yang telah divalidasi oleh BKPM. Nilai realisasi investasi ini memang menurun dari tahun sebelumnya mengingat kondisi perekonomian Indonesia yang mengalami resesi serta pandemi covid-19 yang masih melanda menyebabkan

investasi berjalan sangat lambat. Namun, dengan kondisi saat ini yang semakin membaik akan diharapkan akan berdampak pula terhadap realisasi investasi di daerah.

Dari hasil analisa di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu sebagai penyelenggara pemerintah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu telah menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan efektif dan efisien, serta mampu memberikan kontribusi terhadap tercapainya misi ke 2 daerah yaitu **memperkuat ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada sumber daya daerah yang berkelanjutan.**

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal terdapat beberapa permasalahan yang menjadi tantangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut :

1. **Belum lengkapnya dokumen perencanaan pengembangan investasi daerah.** Hal ini berpengaruh terhadap rencana pengembangan investasi di daerah. Karena dengan adanya dokumen perencanaan pengembangan investasi yang lengkap dan disertai data-data yang akurat akan memudahkan para pemangku kepentingan untuk mengambil kebijakan yang menggerakkan perekonomian daerah dengan menarik datangnya investor untuk berinvestasi di Kabupaten Kapuas Hulu.
2. **Belum optimalnya upaya promosi daerah.** Hal ini berpengaruh terhadap upaya DPMPSTSP Kab. Kapuas Hulu untuk mempromosikan peluang investasi yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu agar lebih dikenal luas, terutama di kalangan investor potensial. Kurangnya pemahaman akan konsep promosi investasi juga

merupakan kendala dalam melaksanakan promosi investasi daerah.

3. **Belum optimalnya pelayanan perizinan berusaha.** Hal ini disebabkan masih belum memadainya sarana dan prasarana pelayanan perizinan yang ada, serta masih kurangnya kuantitas, kualitas dan kompetensi tenaga teknis yang menjadi ujung tombak pelayanan perizinan berusaha DPMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu.
4. **Belum optimalnya fungsi pengendalian penanaman modal dan perizinan berusaha.** Hal ini berpengaruh terhadap jumlah perusahaan yang tertib administrasi dengan melaporkan perkembangan investasinya melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) serta masih banyaknya jumlah pemilik usaha yang belum memenuhi komitmen.

2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu dan Renstra DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu tahun 2016-2021. Rancangan awal RKPD merupakan dokumen yang disusun sebagai pedoman seluruh perangkat daerah dalam menyusun rancangan awal Renja perangkat daerah dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif. Terdapat beberapa perubahan (penambahan dan pengurangan) terhadap Program dan Kegiatan yang disusun berdasarkan dokumen Rancangan Awal RKPD. Hasil analisis kebutuhan menunjukkan perlunya penambahan beberapa kegiatan. Perubahan tersebut didasari oleh :

1. Amanat Permendagri 86 Tahun 2017 terkait waktu dan mekanisme perubahan RPJP dan RPJMD;
2. Penyesuaian terhadap RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022-2026, yang mengakomodir visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih baru;

3. Adanya perubahan peraturan tentang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu di tingkat Nasional;
4. Adanya perubahan peraturan tentang penyusunan anggaran keuangan daerah yang juga mempengaruhi pengurangan atau penambahan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan DPMPTSP di tahun 2022;
5. Adanya dana alokasi khusus (DAK) non fisik berupa Dana Fasilitas Penanaman Modal di tahun anggaran 2021 yang diperuntukkan bagi kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.

Adapun rewiu terhadap Rancangan Awal RKPD disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.3

Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2021
Kabupaten Kapuas Hulu

| No. | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|-----|---|------------------|---|--------------------------------------|-----------------------|--|------------------|---|--------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| | Program / Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.0) | Program / Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp.0) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 1. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | Rp. 1.410.237.000 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | Rp 1.186.149.400 | |
| | Penyediaan jasa surat menyurat > Belanja materai / perangko | Kab. Kapuas Hulu | Tersediannya materai | 300 Materai | Rp 1.500.000 | Penyediaan jasa surat menyurat > Belanja materai / perangko | Kab. Kapuas Hulu | Tersediannya materai | 300 Materai | Rp 1.300.000 | |
| | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik > Belanja telepon, air, listrik dan internet | Kab. Kapuas Hulu | Tersedianya Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik | 12 Bulan | Rp 35.420.000 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik > Belanja telepon, air, listrik dan internet | Kab. Kapuas Hulu | Tersedianya Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik | 12 Bulan | Rp 64.200.000 | |
| | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional > Pembayaran pajak kendaraan dinas | Kab. Kapuas Hulu | Terbayarnya pajak kendaraan dinas operasional | Pajak 2 Unit mobil dan 12 unit motor | Rp 4.500.000 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional > Pembayaran pajak kendaraan | Kab. Kapuas Hulu | Terbayarnya pajak kendaraan dinas operasional | Pajak 1 Unit mobil dan 12 unit motor | Rp 4.250.000 | |
| | Penyediaan jasa administrasi keuangan > Pembayaran honorarium pengelola keuangan dan jasa operator | Kab. Kapuas Hulu | Terbayarnya jasa pengelolaan keuangan dan operator | 16 Orang | Rp 76.098.000 | Penyediaan jasa administrasi keuangan > Pembayaran honorarium pengelola keuangan dan jasa operator | Kab. Kapuas Hulu | Terbayarnya jasa pengelolaan keuangan dan operator | 16 Orang | Rp 90.180.000 | |

| No. | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|-----|--|------------------|--|---|-----------------------|--|------------------|--|---|-----------------------|-----------------|
| | Program / Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.0) | Program / Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp.0) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | Penyediaan jasa pengamanan dan kebersihan kantor > - | Kab. Kapuas Hulu | Terpeliharanya lingkungan gedung kantor | 1 Tahun | Rp 29.312.000 | Penyediaan jasa pengamanan dan kebersihan kantor > - | Kab. Kapuas Hulu | Terpeliharanya lingkungan gedung kantor | 1 Tahun | Rp 56.011.600 | |
| | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja > - | Kab. Kapuas Hulu | Terpeliharanya peralatan kantor | 20 Unit | Rp 21.600.000 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja > - | Kab. Kapuas Hulu | Terpeliharanya peralatan kantor | 20 Unit | Rp 20.000.000 | |
| | Penyediaan alat tulis kantor > - | Kab. Kapuas Hulu | Tersedianya alat tulis kantor | 50 Item | Rp 42.457.000 | Penyediaan alat tulis kantor > - | Kab. Kapuas Hulu | Tersedianya alat tulis kantor | 50 Item | Rp 50.000.000 | |
| | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan > - | Kab. Kapuas Hulu | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan | 8 Item | Rp 14.850.000 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan > - | Kab. Kapuas Hulu | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan | 8 Item | Rp 17.503.000 | |
| | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan | Kab. Kapuas Hulu | Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor | 75 Buah | Rp 3.000.000 | Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan | Kab. Kapuas Hulu | Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor | 75 Buah | Rp 7.932.000 | |
| | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor > - | Kab. Kapuas Hulu | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor | 4 Unit Laptop, 4 Unit Tablet, 1 Set Sound Sistem, 10 Unit Printer | Rp 250.000.000 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor > - | Kab. Kapuas Hulu | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor | 4 Unit Leptop, 4 Unit Tablet, 1 Set Sound Sistem, 10 Unit Printer | Rp 90.850.000 | |
| | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan > - | Kab. Kapuas Hulu | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 6 Surat kabar, 10 Kali Iklan | Rp 18.000.000 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan > - | Kab. Kapuas Hulu | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 6 Surat kabar, 10 Kali Iklan | Rp 19.360.000 | |
| | Kegiatan penunjang pemerintah | , Tentative | Terlaksananya kegiatan penunjang pemerintah lainnya | 1 Tahun | Rp 30.000.000 | Kegiatan penunjang pemerintah | , Tentative | Terlaksananya kegiatan penunjang pemerintah lainnya | 1 Tahun | - | |
| | Penyediaan makanan dan minuman > - | Kab. Kapuas Hulu | Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai dan rapat kantor | 4.720 makanan dan minuman | Rp 54.000.000 | Penyediaan makanan dan minuman > - | Kab. Kapuas Hulu | Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai dan rapat kantor | 4.720 makanan dan minuman | Rp 69.600.000 | |

| No. | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|-----|---|------------------|---|----------------|-------------------------|---|------------------|---|----------------|-----------------------|-----------------|
| | Program / Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.0) | Program / Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp.0) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah > - | , Tentative | Terlaksananya rapat-rapat koordinasi keluar daerah | 50 kali | Rp 466.000.000 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah > | , Tentative | Terlaksananya rapat-rapat koordinasi keluar daerah | 50 kali | Rp 455.000.000 | |
| | Rapat-rapat koordinasi dan kunjungan kerja dalam daerah > - | , Tentative | Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan kunjungan kerja dalam daerah | 30 Kali | Rp 110.000.000 | Rapat-rapat koordinasi dan kunjungan kerja dalam daerah > - | , Tentative | Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan kunjungan kerja dalam daerah | 30 Kali | Rp 75.000.000 | |
| | Penyediaan administrasi pengadaan barang dan jasa > - | Kab. Kapuas Hulu | Tersediannya honorarium pengadaan barang dan jasa | 3 Orang | Rp 3.500.000 | Penyediaan administrasi pengadaan barang dan jasa | Kab. Kapuas Hulu | Tersediannya honorarium pengadaan barang dan jasa | 3 Orang | Rp 5.863.000 | |
| | Penyusunan RKA dan DPA > - | Kab. Kapuas Hulu | Tersusunnya RKA, DPA dan DPPA SKPD | 3 Dokumen | Rp 5.000.000 | Penyusunan RKA dan DPA > - | Kab. Kapuas Hulu | Tersusunnya RKA, DPA dan DPPA SKPD | 3 Dokumen | Rp 5.767.000 | |
| | Penyediaan jasa pendukung kantor > - | Kab. Kapuas Hulu | Tersediannya jasa tenaga kontrak | 5 Orang | Rp 77.000.000 | Penyediaan jasa pendukung kantor > - | Kab. Kapuas Hulu | Tersediannya jasa tenaga kontrak | 5 Orang | Rp 101.997.000 | |
| | Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas > - | Kab. Kapuas Hulu | Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas | 20 Kali | Rp 168.000.000 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas > - | Kab. Kapuas Hulu | Terlaksananya monitoring, evaluasi kegiatan dan pelaporan dinas | 4 Kali | Rp 25.000.000 | |
| 2. | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | | 0 | | Rp 1.711.700.000 | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | | 0 | | Rp 55.606.800 | |
| | Pengadaan kendaraan dinas/operasional> - | Kab. Kapuas Hulu | Tersediannya kendaraan dinas/operasional kantor | 1 Unit mobil | Rp 300.000.000 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional >- | Kab. Kapuas Hulu | Tersediannya kendaraan dinas/operasional kantor | - | - | |
| | Perencanaan pembangunan gedung kantor>- | Kab. Kapuas Hulu | Tersediannya Perencanaan pembangunan gedung kantor | 1 Paket | Rp 250.000.000 | Perencanaan pembangunan gedung kantor>- | Kab. Kapuas Hulu | Tersediannya Perencanaan pembangunan gedung kantor | - | - | |

| No. | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|-----|---|------------------|---|---|-----------------------|---|------------------|---|---|-----------------------|-----------------|
| | Program / Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.0) | Program / Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp.0) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor | Kab. Kapuas Hulu | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor | 2 set kursi tamu, 10 buah kursi dan meja kerja eselon, 5 set kursi tunggu | Rp 200.000.000 | Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor | Kab. Kapuas Hulu | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor | 1 unit lemari, 3 unit filling cabinet, 1 unit tangga, 5 unit notebook, 6 unit printer, 2 unit scanner, 4 unit kursi, 10 unit kursi staf, 5 unit rak buku, 1 unit kamera | Rp. 114.451.000 | |
| | Pengadaan perlengkapan gedung kantor > Pembangunan tempat parkir | Kab. Kapuas Hulu | Tersedianya tempat parkir kendaraan | 1 Paket | Rp 200.000.000 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor > Pembangunan tempat parkir | Kab. Kapuas Hulu | Tersedianya tempat parkir kendaraan | - | - | |
| | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor > - | Kab. Kapuas Hulu | Terpeliharanya gedung kantor | 1 Paket | Rp 150.000.000 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor > - | Kab. Kapuas Hulu | Terpeliharanya gedung kantor | - | - | |
| | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional> - | Kab. Kapuas Hulu | Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional | 2 Unit mobil, 8 Unit motor | Rp 100.000.000 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional >- | Kab. Kapuas Hulu | Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional | 2 Unit mobil, 8 Unit motor | Rp 55.606.800 | |
| | Pengadaan peralatan gedung kantor > Penyediaan instalasi jaringan LAN | Kab. Kapuas Hulu | Tersedianya instalasi jaringan LAN | 1 Paket | Rp 139.700.000 | Pengadaan peralatan gedung kantor > Penyediaan instalasi jaringan LAN | Kab. Kapuas Hulu | Tersedianya instalasi jaringan LAN | - | - | |
| | Pembangunan pusat data, server aplikasi dan pengamanan | Kab. Kapuas Hulu | Tersedianya pusat data server aplikasi dan pengamanan | 1 Paket | Rp 350.000.000 | Pembangunan pusat data, server aplikasi dan pengamanan | Kab. Kapuas Hulu | Tersedianya pusat data server aplikasi dan pengamanan | - | - | |
| 3. | Program peningkatan disiplin aparatur | | 0 | | Rp 88.000.000 | Program peningkatan disiplin aparatur | | 0 | | Rp 40.000.000 | |
| | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya >- | Kab. Kapuas Hulu | Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya | 29 Stel | Rp 45.000.000 | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya >- | Kab. Kapuas Hulu | Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya | - | - | |

| No. | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|-----|---|------------------|---|----------------|-----------------------|---|------------------|---|----------------|-----------------------|-----------------|
| | Program / Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.0) | Program / Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp.0) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu >- | Kab. Kapuas Hulu | Tersedianya pakaian khusus hari- hari tertentu | 29 Stel | Rp 43.000.000 | Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu >- | Kab. Kapuas Hulu | Tersedianya pakaian khusus hari- hari tertentu | 29 Stel | Rp 40.000.000 | |
| 4. | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | | 0 | | Rp 395.000.000 | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | | 0 | | Rp 120.000.000 | |
| | Pendidikan dan pelatihan formal >- | Tentative | Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal | 12 Orang | Rp 395.000.000 | Pendidikan dan pelatihan formal | Tentative | Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal | 16 Orang | Rp 120.000.000 | |
| 5 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | | 0 | | Rp 77.300.000 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | | 0 | | Rp 59.578.000 | |
| | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD > - | Kab. Kapuas Hulu | Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 1 Dokumen | Rp 4.500.000 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD > - | Kab. Kapuas Hulu | Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 1 Dokumen | Rp 8.004.000 | |
| | Penyusunan pelaporan keuangan semesteran SKPD > - | Kab. Kapuas Hulu | Tersedianya laporan keuangan semesteran SKPD | 1 Dokumen | Rp 5.000.000 | Penyusunan pelaporan keuangan semesteran SKPD > - | Kab. Kapuas Hulu | Tersedianya laporan keuangan semesteran SKPD | 1 Dokumen | - | |
| | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun > - | Kab. Kapuas Hulu | Tersedianya laporan keuangan akhir tahun | 1 Dokumen | Rp 4.000.000 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun > - | Kab. Kapuas Hulu | Tersedianya laporan keuangan akhir tahun | 1 Dokumen | Rp 5.265.000 | |
| | Penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja SKPD | Kab. Kapuas Hulu | Tersedianya analisis beban kerja dan analisis jabatan | 2 Dokumen | Rp 12.000.000 | Penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja SKPD | Kab. Kapuas Hulu | Tersedianya analisis beban kerja dan analisis jabatan | 2 Dokumen | - | |
| | Penyusunan standar operasional prosedur (SOP) | Kab. Kapuas Hulu | Tersedianya SOP | 10 Dokumen | Rp 22.000.000 | Penyusunan standar operasional prosedur (SOP) | Kab. Kapuas Hulu | Tersedianya SOP | 10 Dokumen | Rp 17.894.000 | |

| No. | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|-----|---|------------------|--|------------------|-----------------------|---|------------------|--|------------------|-----------------------|-----------------|
| | Program / Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.0) | Program / Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp.0) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | Penyusunan rencana tahunan dan penetapan kinerja tahunan SKPD > - | Kab. Kapuas Hulu | Tersedianya rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja tahunan SKPD | 1 Dokumen | Rp 3.000.000 | Penyusunan rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja tahunan SKPD > - | Kab. Kapuas Hulu | Tersedianya rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja tahunan SKPD | 1 Dokumen | Rp 6.189.700 | |
| | Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian SKPD | Kab. Kapuas Hulu | Tersedianya DUK dan Daftar Nominatif Pegawai | 1 Dokumen | Rp 8.000.000 | Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian SKPD | Kab. Kapuas Hulu | Tersedianya DUK dan Daftar Nominatif Pegawai | 1 Dokumen | Rp 7.000.000 | |
| | Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah di SKPD > - | Kab. Kapuas Hulu | Tersedianya LPPD SKPD | 1 Dokumen | Rp 8.000.000 | Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah di SKPD > - | Kab. Kapuas Hulu | Tersedianya LPPD SKPD | 1 Dokumen | - | |
| | penyusunan laporan tahunan > - | Kab. Kapuas Hulu | Tersedianya laporan tahunan SKPD | 1 Dokumen | Rp 7.000.000 | penyusunan laporan tahunan > - | Kab. Kapuas Hulu | Tersedianya laporan tahunan SKPD | 1 Dokumen | - | |
| | Penyusunan Laporan Inventarisasi aset SKPD | Kab. Kapuas Hulu | Tersedianya laporan inventarisasi aset SKPD | 2 Dokumen | Rp 3.800.000 | Penyusunan Laporan Inventarisasi aset SKPD | Kab. Kapuas Hulu | Tersedianya laporan inventarisasi aset SKPD | 2 Dokumen | Rp 1.909.600 | |
| 6 | Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi | | 0 | | Rp 744.000.000 | Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi | | 0 | | Rp 469.334.000 | |
| | Pameran investasi daerah > - | Tentative | Terlaksananya pameran investasi daerah | 3 Minat investor | Rp 290.000.000 | Pameran investasi daerah > - | Tentative | Terlaksananya pameran investasi daerah | 3 Minat investor | Rp 252.308.000 | |
| | Penyusunan data statistik penanaman modal | Kab. Kapuas Hulu | Tersedianya data statistik penanaman modal | 1 Dokumen | Rp 75.000.000 | Penyusunan data statistik penanaman modal | Kab. Kapuas Hulu | Tersedianya data statistik penanaman modal | 1 Dokumen | - | |
| | Pengelolaan sistem informasi potensi investasi daerah (SIPID) | Kab. Kapuas Hulu | Tersedianya informasi potensi investasi daerah (SIPID) | 2 Kegiatan | Rp 20.000.000 | Pengelolaan sistem informasi potensi investasi | Kab. Kapuas Hulu | Tersedianya informasi potensi investasi daerah (SIPID) | 2 Kegiatan | Rp 47.026.000 | |

| No. | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|-----|--|------------------|--|-------------------------------------|-----------------------|--|------------------|--|-------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| | Program / Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.0) | Program / Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp.0) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal > - | , Tentative | Terlaksananya pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal | 45 Perusahaan | Rp 279.000.000 | Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal > - | , Tentative | Terlaksananya pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal | 45 Perusahaan | Rp 170.000.000 | |
| | Penyediaan sarana dan prasarana promosi penanaman modal | Kab. Kapuas Hulu | Tersedianya sarana dan prasarana promosi penanaman modal | 450 Leaflet, 300 brosur, 50 Buah CD | Rp 80.000.000 | Penyediaan sarana dan prasarana promosi penanaman modal | Kab. Kapuas Hulu | Tersedianya sarana dan prasarana promosi penanaman modal | 450 Leaflet, 300 brosur, 50 Buah CD | - | |
| 7 | Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi | | 0 | | Rp 520.000.000 | Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi | | 0 | | Rp 520.000.000 | |
| | Workshop penyusunan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) | Kab. Kapuas Hulu | Terlaksananya workshop penyusunan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) | 30 Perusahaan | Rp 50.000.000 | Workshop penyusunan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) | Kab. Kapuas Hulu | Terlaksananya workshop penyusunan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) | 30 Perusahaan | - | |
| | Sosialisasi kebijakan penanaman modal > - | Kab. Kapuas Hulu | Terlaksananya sosialisasi kebijakan penanaman modal | 50 Perusahaan | Rp 34.000.000 | Sosialisasi kebijakan penanaman modal > - | Kab. Kapuas Hulu | Terlaksananya a sosialisasi kebijakan penanaman modal | 50 Perusahaan | - | |
| | Penyusunan Perubahan Perda PM | Kab. Kapuas Hulu | Terlaksananya penyusunan Perubahan Perda penanaman modal | 1 Dokumen | - | Penyusunan Penyusunan Perubahan Perda PM | Kab. Kapuas Hulu | Terlaksananya penyusunan Perubahan Perda penanaman modal | 1 Dokumen | Rp. 391.406.000 | |
| | Penyusunan Perubahan Perbup RUPM | Kab. Kapuas Hulu | Terlaksananya Penyusunan Perubahan Perbup RUPM | 1 Dokumen | - | Penyusunan Perubahan Perbup RUPM | Kab. Kapuas Hulu | Terlaksananya Penyusunan Perubahan Perbup RUPM | 1 Dokumen | Rp. 350.000.000 | |
| | Rapat koordinasi teknis perencanaan penanaman modal | Tentative | Terlaksananya rapat koordinasi teknis perencanaan penanaman modal | 3 Kali | Rp 85.000.000 | Rapat koordinasi teknis perencanaan penanaman modal | Tentative | Terlaksananya rapat koordinasi teknis perencanaan penanaman modal | 3 Kali | Rp 59.000.000 | |

| No. | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|-----|--|------------------|---|----------------|-----------------------|--|------------------|---|----------------|-----------------------|-----------------|
| | Program / Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.0) | Program / Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp.0) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | Penyusunan Peta Potensi Kab. Kapuas Hulu | Kab. Kapuas Hulu | Terlaksananya Penyusunan Peta Potensi Kapuas Hulu | 1 Dokumen | Rp 200.000.000 | Penyusunan Peta Potensi Kab. Kapuas Hulu | Kab. Kapuas Hulu | Terlaksananya Penyusunan Peta Potensi Kab. Kapuas Hulu | 1 Dokumen | Rp 201.600.000 | |
| 8 | Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan | | 0 | | Rp 688.000.000 | Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan | | 0 | | Rp 688.000.000 | |
| | Pengawasan dan Pengendalian Perizinan dan Non Perizinan > - | , Tentative | Terlaksananya pengawasan dan pengendalian perizinan dan non perizinan | 5 Kecamatan | Rp 178.000.000 | Pengawasan dan Pengendalian Perizinan dan Non Perizinan > - | , Tentative | Terlaksananya pengawasan dan pengendalian perizinan dan non perizinan | 5 Kecamatan | Rp 116.954.600 | |
| | Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Keliling > - | , Tentative | Terlaksananya pelayanan perizinan dan non perizinan keliling Kab. KH | 3 Kecamatan | Rp 234.000.000 | Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Keliling > - | , Tentative | Terlaksananya pelayanan perizinan dan non perizinan keliling Kab. KH | 3 Kecamatan | Rp 55.597.800 | |
| | Penyusunan survey kepuasan masyarakat (SKM) OPD > - | Kab. Kapuas Hulu | Tersedianya SKM OPD | Baik | Rp 87.000.000 | Penyusunan survey kepuasan masyarakat (SKM) OPD > - | Kab. Kapuas Hulu | Tersedianya SKM OPD | Baik | Rp 35.000.000 | |
| | Penataan perizinan > - | Kab. Kapuas Hulu | Terlaksananya penataan perizinan | 1 Dokumen | Rp 64.000.000 | Penataan perizinan > - | Kab. Kapuas Hulu | Terlaksananya penataan perizinan | 1 Dokumen | Rp 74.776.800 | |
| | Fasilitasi dan koordinasi tentang pengaduan masyarakat > - | Kab. Kapuas Hulu | Pengaduan yang ditangani dan ditindaklanjuti | 3 Pengaduan | Rp 25.000.000 | Fasilitasi dan koordinasi tentang pengaduan masyarakat > - | Kab. Kapuas Hulu | Pengaduan yang ditangani dan ditindaklanjuti | 3 Pengaduan | Rp - | |
| | Publikasi dan informasi perizinan dan non perizinan > - | Kab. Kapuas Hulu | Terlaksananya publikasi dan informasi perizinan dan non perizinan | 2 Publikasi | Rp 100.000.000 | Publikasi dan informasi perizinan dan non perizinan >- | Kab. Kapuas Hulu | Terlaksananya publikasi dan informasi perizinan dan non perizinan | 2 Publikasi | Rp 175.000.000 | |

2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Musyawarah perencanaan pembangunan daerah tahun 2022 belum dilaksanakan . Namun berdasarkan tahun–tahun sebelumnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu tidak mendapat masukan program / kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan perizinan berusaha, maupun dari Lembaga Sosial Masyarakat (LSM), asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi ataupun pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bidang penanaman modal merupakan kebijakan yang diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, pelayanan terpadu satu pintu dimaksudkan untuk membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal. Dalam Undang-Undang tersebut, pelayanan terpadu satu pintu diartikan sebagai kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian wewenang dari instansi yang memiliki kewenangan dimana proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat. Pengertian ini berbeda dengan pengertian "pelayanan terpadu satu atap". Dalam Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003, pengertian "pelayanan terpadu satu atap" adalah pola pelayanan yang diselenggarakan dalam satu tempat untuk berbagai jenis pelayanan yang tidak mempunyai keterkaitan proses dan dilayani melalui beberapa pintu, sedangkan "pelayanan terpadu satu pintu" adalah pola pelayanan yang diselenggarakan dalam satu tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang memiliki keterkaitan proses dan dilayani melalui satu pintu.

Pelayanan terpadu satu pintu di tingkat pusat dilakukan oleh lembaga yang berwenang di bidang penanaman modal yang mendapat pendelegasian dari lembaga yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan di tingkat Pusat, Propinsi atau Kabupaten/Kota. Lembaga yang dimaksud disini adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atau Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMDD). Pemerintah mengkoordinasikan kebijakan penanaman modal, baik koordinasi antar instansi Pemerintah, antar instansi Pemerintah dengan Bank Indonesia, antar instansi

Pemerintah dengan Pemerintah Daerah, maupun antar Pemerintah Daerah. Koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal tersebut dilakukan oleh BKPM. Dalam melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu, BKPM harus melibatkan perwakilan secara langsung dari setiap sektor dan daerah terkait dengan pejabat yang mempunyai kompetensi dan kewenangan. Dilihat dari ketentuan-ketentuan dalam Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 di atas, pada tingkat Nasional telah terdapat “payung” bagi pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu. Hal yang berkaitan dengan apa itu pelayanan terpadu satu pintu, tujuan pembentukannya, kelembagaannya, hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah diatur lebih tegas. Ketegasan ini dapat menciptakan kepastian bagi aparat pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan tugasnya, kepastian bagi penanam modal, dan kepastian bagi masyarakat umum. Meskipun demikian, pengaturan ” payung” tersebut tidak akan dapat dilaksanakan tanpa adanya pengaturan mengenai mekanisme dan tata cara pelayanan terpadu satu pintu. Undang-Undang hanya mengatur pelayanan terpadu satu pintu secara umum dan memerintahkan penyusunan Peraturan Presiden untuk mengatur tata cara dan pelaksanaannya.

Adanya Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission (OSS)*, yaitu suatu sistem pemrosesan perizinan terintegrasi secara elektronik, menjadi upaya pemerintah untuk menyederhanakan perizinan berusaha di Indonesia dan menciptakan model pelayanan terintegrasi yang cepat dan murah serta memberi kepastian. Dengan adanya OSS ini, masyarakat dapat mengakses layanannya secara daring di manapun berada. Manfaat OSS lainnya adalah :

1. Mempermudah pengurusan berbagai perizinan berusaha baik prasyarat untuk melakukan usaha (izin terkait lokasi, lingkungan, dan bangunan), izin usaha, maupun izin operasional untuk kegiatan operasional usaha di tingkat pusat ataupun daerah dengan mekanisme pemenuhan komitmen persyaratan izin

2. Memfasilitasi pelaku usaha untuk terhubung dengan semua *stakeholder* dan memperoleh izin secara aman, cepat dan *real time*.
3. Memfasilitasi pelaku usaha dalam melakukan pelaporan dan pemecahan masalah perizinan dalam satu tempat.
4. Memfasilitasi pelaku usaha untuk menyimpan data perizinan dalam satu identitas berusaha (NIB).

Aturan baru ini tentu saja membawa dampak perubahan bagi DPMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu. Sehingga perlu melakukan banyak penyesuaian dan perbaikan. Terutama dari sisi aparturnya, perlu ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan OSS, karena DPMPTSP merupakan lembaga penyelenggara OSS di daerah. Dengan mengikuti berbagai pelatihan diharapkan dapat mengimplementasikan dalam pendampingan OSS dengan baik sesuai aturan yang berlaku dan dapat memberikan pelayanan perizinan yang lebih baik kepada masyarakat.

Adapun perizinan yang belum dapat diproses melalui OSS ini, proses penerbitan perizinannya menggunakan aplikasi SiCantik. SiCantik merupakan Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terintegrasi untuk Publik yang fungsi utamanya adalah untuk menyederhanakan proses perizinan. SiCANTIK sendiri adalah aplikasi berbasis *web* yang nantinya akan terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS) untuk perizinan berusaha maupun layanan lain yang dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Perumusan tujuan dan sasaran digunakan dalam penyusunan rencana strategis perangkat daerah, yang mana merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Adapun Tujuan yang telah dirumuskan dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Meningkatkan investasi di Kabupaten Kapuas Hulu.

Tujuan 1 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu diarahkan pada upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja yang telah dicapai saat ini, meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan, meningkatkan kompetensi aparatur, dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kerja yang telah dimiliki.

Tujuan 2 : Meningkatkan investasi di Kabupaten Kapuas Hulu diarahkan pada upaya untuk meningkatkan fungsi perencanaan penanaman modal, mengoptimalkan promosi dan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan, mengoptimalkan proses perizinan penanaman modal, dan meningkatkan fungsi pengendalian investasi.

Berdasarkan masing-masing tujuan yang telah disepakati maka dibuat sasaran untuk kuantifikasi lebih lanjut dan lebih teknis yang dapat dikelola pencapaiannya. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program Perangkat Daerah.

Adapun sasaran yang telah dirumuskan dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas PMPTSP Kab Kapuas Hulu;

2. Meningkatkan kualitas pelayanan yang diselenggarakan DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu;
3. Meningkatkan realisasi investasi di Daerah.

Sasaran 1 : Meningkatkan akuntabilitas kinerja DPMPTSP Kab Kapuas Hulu diarahkan pada upaya meningkatkan predikat nilai evaluasi SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu secara bertahap, yang mana untuk kepentingan tersebut didukung oleh program :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

Selanjutnya Sasaran 2 : Meningkatkan Kualitas pelayanan yang diselenggarakan DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu diarahkan pada upaya meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan di bidang penanaman modal, yang mana didukung dengan 2 program, yaitu :

1. Program Pelayanan Penanaman Modal;
2. Program Pengelolaan Data dan sistem Informasi Penanaman Modal.

Kemudian Sasaran 3 : Meningkatkan realisasi investasi di Daerah diarahkan pada upaya meningkatkan nilai realisasi investasi di daerah baik Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing, yang mana didukung dengan 3 (tiga) program, yaitu :

1. Program Promosi Penanaman Modal;
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
3. Program Pengendalian Penanaman Modal.

Keterkaitan antara tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu dalam masa periode Renstra (2016-2021) serta indikator kerjanya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 3.1

Tujuan dan sasaran DPMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu periode Renstra (2016-2021)

| NO. | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR TUJUAN / SASARAN | TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN | | | | | |
|-----|---|---|--|--|------|------|------|------|------|
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. | Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas Pelayanan publik Dinas Penanaman Modal dan PTSP | Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP | Predikat SAKIP | CC | CC | CC | B | B | BB |
| | | Meningkatkan Kualitas pelayanan publik Dinas Penanaman Modal dan PTSP | Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) | 80 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| 2. | Meningkatkan investasi di Kabupaten Kapuas Hulu | Meningkatkan realisasi investasi di Daerah | Nilai Realisasi Investasi PMDN (Milyar rupiah) | 112 | 139 | 173 | 226 | 299 | 398 |

Tabel diatas menunjukkan indikator predikat SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2022 ditargetkan berpredikat “BB”. Sedangkan indikator Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) tahun 2022 ditargetkan dengan nilai Baik (80 poin), serta indikator nilai realisasi investasi ditargetkan sebesar 398 Milyar.

3.3. Program dan Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di tahun 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu menetapkan 5 (lima) program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Program ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi perkantoran, meningkatnya efektivitas dan efisiensi operasional kantor, serta meningkatnya profesionalisme aparatur. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota kemudian dijabarkan dalam beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang terdiri dari :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terdiri atas beberapa sub kegiatan yaitu :
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah,
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD,
 - c) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD,
 - d) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD,
 - e) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD,
 - f) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD,
 - g) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, yang terdiri atas beberapa sub kegiatan, yaitu :
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN,
 - b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN,
 - c) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD,
 - d) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD,
 - e) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD,
 - f) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan,
 - g) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD,
 - h) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, yang terdiri atas beberapa sub kegiatan, yaitu :
 - a) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD,
 - b) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD.

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, yang terdiri atas beberapa sub kegiatan, yaitu :
 - a) Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai,
 - b) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya,
 - c) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian,
 - d) Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian,
 - e) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai,
 - f) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi,
 - g) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan,
 - h) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, yang terdiri atas beberapa sub kegiatan, yaitu :
 - a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor,
 - b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor,
 - c) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga,
 - d) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan,
 - e) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan,
 - f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD,
 - g) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD,
 - h) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, yang terdiri dari beberapa sub kegiatan :
 - a) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan,
 - b) Pengadaan Mebel,

- c) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya,
 - d) Pengadaan Aset Tak Berwujud,
 - e) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya,
 - f) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya,
 - g) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari beberapa sub kegiatan, yaitu :
- a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat,
 - b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik,
 - c) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor,
 - d) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari beberapa sub kegiatan, yaitu :
- a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan,
 - b) Pemeliharaan Mebel,
 - c) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya,
 - d) Pemeliharaan Aset Tak Berwujud,
 - e) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya,
 - f) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya,
 - g) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya,

2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Program pengembangan iklim penanaman modal bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan iklim penanaman modal agar kondusif dan berdaya saing sehingga dapat meningkatkan minat investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Kapuas Hulu. Program ini dapat dijabarkan dalam beberapa kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri atas sub kegiatan :
 - a) Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal,
 - b) Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.
2. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota yang terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :
 - a) Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota,
 - b) Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota.

3. Program Promosi Penanaman Modal

Program ini bertujuan untuk mendorong kegiatan promosi penanaman modal agar dapat berjalan efektif, lancar dan efisien. Program ini dapat dijabarkan dalam beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang terdiri dari :

1. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, yang terdiri dari sub kegiatan :
 - a) Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal,
 - b) Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota.

4. Program Pelayanan Penanaman Modal

Hasil yang diharapkan dari program Pelayanan Penanaman Modal adalah

memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam kepengurusan perizinan dan non perizinan. Program pelayanan penanaman modal ini dapat dijabarkan dalam beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang terdiri dari :

1. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota, yang terdiri dari sub kegiatan :
 - a) Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik,
 - b) Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal,
 - c) Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan,
 - d) Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah.

5. Program Pengendalian Penanaman Modal

Program pengendalian penanaman modal bertujuan untuk mendorong tertib administrasi bagi para pelaku usaha yang berinvestasi di Kabupaten Kapuas Hulu khususnya dalam menyampaikan laporan perkembangan penanaman modal. Program ini kemudian dijabarkan dalam kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, yang terdiri dari sub kegiatan :
 - a) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal,
 - b) Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal,
 - c) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal.

6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Program ini bertujuan untuk mengelola data dan informasi penanaman modal sehingga dapat disajikan dan digunakan oleh pemangku kepentingan dan kebijakan baik di daerah maupun provinsi. Program ini dapat dijabarkan dalam kegiatan dan sub

kegiatan :

1. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, yang terdiri dari sub kegiatan :
 - a) Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Suatu program adalah kumpulan proyek-proyek yang berhubungan dan dirancang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang harmonis dan secara integrasi untuk mencapai sasaran kebijaksanaan tersebut secara keseluruhan. Program merupakan unsur pertama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan. Melalui program maka segala bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk direalisasikan. Untuk itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu merumuskan 6 (enam) Program yang akan dilaksanakan agar Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022 akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk direalisasikan guna pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun program-program tersebut adalah :

1. *Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota*

Program ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi perkantoran, meningkatnya efektivitas dan efisiensi operasional kantor, serta meningkatnya profesionalisme aparatur. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota kemudian dijabarkan dalam beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang terdiri dari :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terdiri atas beberapa sub kegiatan yaitu :
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah,
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD,
 - c) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD,
 - d) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD,
 - e) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD,

- f) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD,
 - g) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, yang terdiri atas beberapa sub kegiatan, yaitu :
- a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN,
 - b) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD,
 - c) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD,
 - d) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD,
 - e) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan,
 - f) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD,
 - g) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, yang terdiri atas beberapa sub kegiatan, yaitu :
- a) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD,
 - b) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD.
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, yang terdiri atas beberapa sub kegiatan, yaitu :
- a) Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai,
 - b) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya,
 - c) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian,
 - d) Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian,
 - e) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai,
 - f) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi,

- g) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan,
 - h) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, yang terdiri atas beberapa sub kegiatan, yaitu :
- a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor,
 - b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor,
 - c) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga,
 - d) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan,
 - e) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan,
 - f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD,
 - g) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD,
 - h) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, yang terdiri dari beberapa sub kegiatan :
- a) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan,
 - b) Pengadaan Mebel,
 - c) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya,
 - d) Pengadaan Aset Tak Berwujud,
 - e) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya,
 - f) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya,
 - g) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari beberapa sub kegiatan, yaitu :

- a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat,
 - b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik,
 - c) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor,
 - d) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari beberapa sub kegiatan, yaitu :
- a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan,
 - b) Pemeliharaan Mebel,
 - c) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya,
 - d) Pemeliharaan Aset Tak Berwujud,
 - e) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya,
 - f) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya,
 - g) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya,

2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Program pengembangan iklim penanaman modal bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan iklim penanaman modal agar kondusif dan berdaya saing sehingga dapat meningkatkan minat investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Kapuas Hulu. Program ini dapat dijabarkan dalam beberapa kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri atas sub kegiatan :
 - a) Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal,

- b) Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.
- b. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota yang terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :
 - a) Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota,
 - b) Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota.

3. Program Promosi Penanaman Modal

Program ini bertujuan untuk mendorong kegiatan promosi penanaman modal agar dapat berjalan efektif, lancar dan efisien. Program ini dapat dijabarkan dalam beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang terdiri dari :

- a. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, yang terdiri dari sub kegiatan :
 - a) Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal,
 - b) Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota.

4. Program Pelayanan Penanaman Modal

Hasil yang diharapkan dari program Pelayanan Penanaman Modal adalah memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam kepengurusan perizinan dan non perizinan. Program pelayanan penanaman modal ini dapat dijabarkan dalam beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang terdiri dari :

- a. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota, yang terdiri dari sub kegiatan :
 - a) Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik,
 - b) Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal,

- c) Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan,
- d) Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah.

5. Program Pengendalian Penanaman Modal

Program pengendalian penanaman modal bertujuan untuk mendorong tertib administrasi bagi para pelaku usaha yang berinvestasi di Kabupaten Kapuas Hulu khususnya dalam menyampaikan laporan perkembangan penanaman modal. Program ini kemudian dijabarkan dalam kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, yang terdiri dari sub kegiatan :
 - a) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal,
 - b) Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal,
 - c) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal.

6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Program ini bertujuan untuk mengelola data dan informasi penanaman modal sehingga dapat disajikan dan digunakan oleh pemangku kepentingan dan kebijakan baik di daerah maupun provinsi. Program ini dapat dijabarkan dalam kegiatan dan sub kegiatan :

- a. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, yang terdiri dari sub kegiatan :
 - a) Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

Indikasi pendanaan program dan kegiatan Dinas PMPTSP didasarkan kepada program dan kegiatan yang efeknya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat atau *stakeholder*. Rumusan rencana program dan kegiatan

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Kapuas Hulu Tahun 2022 dan perkiraan maju tahun 2023 sebagaimana tercantum
pada tabel berikut :

Tabel 4.1

**RUMUSAN RENCANA KERJA, PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU 2023
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAPUAS HULU**

| Kode | | | | | Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju 2023 | |
|--------|------------|---------|----------|--------------|---|--|--------------------|-----------------|---------------|------------------------|---------------|-------------|-----------------|------------------------|---------------|
| Urusan | Sub Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | | | Lokasi | Belanja Operasi | Belanja Modal | Target Capaian Kinerja | Pagu | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 12 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | Kab. Kapuas Hulu | 7.029.514.146 | 543.000.000 | | 7,471,218,686 | DAK /DAU | | | 8,218,340,554 |
| 2 | 18 | | | | PENANAMAN MODAL | Nilai Realisasi Investasi | Kab. Kapuas Hulu | 7.029.514.146 | 543.000.000 | 412 Milyar | 7,471,218,686 | DAK /DAU | | 416,12 Milyar | 8,218,340,554 |
| 2 | 18 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Predikat SAKIP OPD | Kab. Kapuas Hulu | 4.497.701.426 | 543.000.000 | BB (77) | 4.497.701.426 | DAU | | BB (78) | 4.947.471.568 |
| 2 | 18 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen perencanaan, penganggaran yang benar dan tepat waktu | Kab. Kapuas Hulu | 267.112.000 | | 9 dokumen | 267.112.000 | DAU | | 9 dokumen | 293.823.200 |
| 2 | 18 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen | Kab. Kapuas Hulu | 48.836.000 | - | 2 dokumen | 48.836.000 | DAU | | 2 dokumen | 53.719.600 |
| 2 | 18 | 01 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah dokumen | Kab. Kapuas Hulu | 4.235.000 | - | 1 dokumen | 4.235.000 | DAU | | 1 dokumen | 4.658.500 |
| 2 | 18 | 01 | 2.01 | 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah dokumen | Kab. Kapuas Hulu | 4.235.000 | - | 1 dokumen | 4.235.000 | DAU | | 1 dokumen | 4.658.500 |

| Kode | | | | | Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju 2023 | |
|--------|------------|---------|----------|--------------|--|--|--------------------|-----------------|---------------|------------------------|---------------|-----------------|---------------------|------------------------|
| Urusan | Sub Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | | | Lokasi | Belanja Operasi | Belanja Modal | Target Capaian Kinerja | Pagu | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja |
| 2 | 18 | 01 | 2.01 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah dokumen | Kab. Kapuas Hulu | 4.235.000 | - | 1 dokumen | 4.235.000 | DAU | 1 dokumen | 4.658.500 |
| 2 | 18 | 01 | 2.01 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah dokumen | Kab. Kapuas Hulu | 4.235.000 | - | 1 dokumen | 4.235.000 | DAU | 1 dokumen | 4.658.500 |
| 2 | 18 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja | Jumlah dokumen | Kab. Kapuas Hulu | 109.600.000 | - | 1 dokumen | 109.600.000 | DAU | 1 dokumen | 120.560.000 |
| 2 | 18 | 01 | 2.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen | Kab. Kapuas Hulu | 91.736.000 | - | 2 dokumen | 91.736.000 | DAU | 2 dokumen | 100.909.600 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 18 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Prosentase penyerapan anggaran | | 2.436.834.424 | - | 95% | 2.436.834.424 | DAU | 95% | 2.680.517.867 |
| 2 | 18 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah bulan dibayarkan gaji dan tunjangan PNS | Kab. Kapuas Hulu | 2.209.626.724 | - | 12 bulan | 2.209.626.724 | DAU | 12 bulan | 2.430.589.396 |
| 2 | 18 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah bulan dibayarkan honor penatausahaan keuangan | Kab. Kapuas Hulu | 172.278.700 | - | 9 orang | 172.278.700 | DAU | 9 orang | 189.506.570 |
| 2 | 18 | 01 | 2.02 | 04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah dokumen | Kab. Kapuas Hulu | 26.558.000 | - | 1 dokumen | 26.558.000 | DAU | 1 dokumen | 29.213.800 |
| 2 | 18 | 01 | 2.02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | Jumlah dokumen | Kab. Kapuas Hulu | 8.042.000 | - | 1 dokumen | 8.042.000 | DAU | 1 dokumen | 8.846.200 |

| Kode | | | | | Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju 2023 | |
|--------|------------|---------|----------|--------------|---|---|--------------------|-----------------|---------------|--------------------------------|-------------|-----------------|---------------------|------------------------|
| Urusan | Sub Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | | | Lokasi | Belanja Operasi | Belanja Modal | Target Capaian Kinerja | Pagu | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja |
| 2 | 18 | 01 | 2.02 | 06 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah dokumen | Kab. Kapuas Hulu | 4.235.000 | | 1 dokumen | 4.235.000 | DAU | 1 dokumen | 4.658.500 |
| 2 | 18 | 01 | 2.02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah dokumen | Kab. Kapuas Hulu | 8.052.000 | - | 1 dokumen | 8.052.000 | DAU | 1 dokumen | 8.857.200 |
| 2 | 18 | 01 | 2.02 | 08 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah dokumen | Kab. Kapuas Hulu | 8.042.000 | - | 1 dokumen | 8.042.000 | DAU | 1 dokumen | 8.846.200 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 18 | 01 | 2.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah dokumen administrasi barang milik negara | Kab. Kapuas Hulu | 6.820.000 | - | 2 dokumen | 6.820.000 | DAU | 2 dokumen | 7.502.000 |
| 2 | 18 | 01 | 2.03 | 01 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah dokumen | Kab. Kapuas Hulu | 3.410.000 | - | 1 dokumen | 3.410.000 | DAU | 1 dokumen | 3.751.000 |
| 2 | 18 | 01 | 2.03 | 05 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah dokumen | Kab. Kapuas Hulu | 3.410.000 | - | 1 dokumen | 3.410.000 | DAU | 1 dokumen | 3.751.000 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 18 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Prosentase kehadiran ASN dalam 1 tahun | Kab. Kapuas Hulu | 278.934.000 | - | 93% | 278.934.000 | DAU | 93,50% | 306.827.400 |
| 2 | 18 | 01 | 2.05 | 01 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah sarana dan prasarana disiplin pegawai | Kab. Kapuas Hulu | 30.250.000 | - | 1 set mesin absen finger print | 30.250.000 | DAU | - | - |
| 2 | 18 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah pakaian dinas | Kab. Kapuas Hulu | 27.200.000 | | 32 stel | 27.200.000 | DAU | 32 stel | 29.920.000 |

| Kode | | | | | Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju 2023 | |
|--------|------------|---------|----------|--------------|--|--|--------------------|-----------------|---------------|------------------------|-------------|-----------------|---------------------|------------------------|
| Urusan | Sub Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | | | Lokasi | Belanja Operasi | Belanja Modal | Target Capaian Kinerja | Pagu | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja |
| 2 | 18 | 01 | 2.05 | 03 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Tersedianya data pegawai | Kab. Kapuas Hulu | 8.400.000 | - | 1 dokumen | 8.400.000 | DAU | 1 dokumen | 9.240.000 |
| 2 | 18 | 01 | 2.05 | 04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Terlaksananya sistem informasi pegawai | Kab. Kapuas Hulu | 5.700.000 | - | 1 dokumen | 5.700.000 | DAU | 1 dokumen | 6.270.000 |
| 2 | 18 | 01 | 2.05 | 05 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah dokumen | Kab. Kapuas Hulu | 5.700.000 | - | 32 dokumen | 5.700.000 | DAU | 32 dokumen | 6.270.000 |
| 2 | 18 | 01 | 2.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah pegawai yang mengikuti diklat | Kab. Kapuas Hulu | 68.160.000 | - | 10 orang | 68.160.000 | DAU | 10 orang | 74.976.000 |
| 2 | 18 | 01 | 2.05 | 10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi | Kab. Kapuas Hulu | 65.364.000 | - | 10 orang | 65.364.000 | DAU | 10 orang | 71.900.400 |
| 2 | 18 | 01 | 2.05 | 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek | Kab. Kapuas Hulu | 68.160.000 | - | 10 orang | 68.160.000 | DAU | 10 orang | 74.976.000 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 18 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Prosentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah | Kab. Kapuas Hulu | 385.511.001 | - | 70 item | 385.511.001 | DAU | 69 item | 424.062.101 |
| 2 | 18 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah item komponen instalasi listrik | Kab. Kapuas Hulu | 51.022.000 | - | 12 item | 51.022.000 | DAU | 12 item | 56.124.200 |
| 2 | 18 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah item peralatan dan perlengkapan kantor | Kab. Kapuas Hulu | 59.746.000 | - | 55 item | 59.746.000 | DAU | 55 item | 65.720.600 |

| Kode | | | | | Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju 2023 | |
|--------|------------|---------|----------|--------------|--|---|--------------------|-----------------|---------------|--|-------------|-----------------|---|------------------------|
| Urusan | Sub Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | | | Lokasi | Belanja Operasi | Belanja Modal | Target Capaian Kinerja | Pagu | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja |
| 2 | 18 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah item perlatan rumah tangga | Kab. Kapuas Hulu | 15.000.000 | - | 3 lusin gelas minum harian, 3 lusin gelas tamu, 2 unit dispenser air | 15.000.000 | DAU | 1 unit magiccom, 3 unit dispenser panas dingin, | 16.500.000 |
| 2 | 18 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah item barang cetakan | Kab. Kapuas Hulu | 57.743.000 | - | 15 item | 57.743.000 | DAU | 15 item | 63.517.300 |
| 2 | 18 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah item bahan bacaan | Kab. Kapuas Hulu | 11.000.000 | - | 5 item | 11.000.000 | DAU | 5 item | 12.100.000 |
| 2 | 18 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Daerah | Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD daerah | Kab. Kapuas Hulu | 143.000.000 | - | 50 kali | 143.000.000 | DAU | 50 kali | 157.300.000 |
| 2 | 18 | 01 | 2.06 | 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Terlaksananya penatausahaan arsip dinamis SKPD | Kab. Kapuas Hulu | 24.000.000 | - | terkelolanya arsip dinamis SKPD | 24.000.000 | DAU | terkelolanya arsip dinamis SKPD | 26.400.000 |
| 2 | 18 | 01 | 2.06 | 11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Terlaksananya dukungan pelaksanaan SPBE | Kab. Kapuas Hulu | 24.000.000 | - | tersedianya dukungan SPBE | 24.000.000 | DAU | tersedianya dukungan SPBE | 26.400.000 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 18 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Prosentase sarana prasarana kantor disediakan | Kab. Kapuas Hulu | 80.450.000 | 543.000.000 | 100% | 623.450.000 | DAU | 100% | 685.795.000 |
| 2 | 18 | 01 | 2.07 | 02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas/opersional disediakan | Kab. Kapuas Hulu | - | - | 0 unit | - | DAU | 4 unit motor | 65.000.000 |

| Kode | | | | | Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju 2023 | |
|--------|------------|---------|----------|--------------|--|--|--------------------|-----------------|---------------|---|-------------|-----------------|--|------------------------|
| Urusan | Sub Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | | | Lokasi | Belanja Operasi | Belanja Modal | Target Capaian Kinerja | Pagu | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja |
| 2 | 18 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel | Jumlah mebel disediakan | Kab. Kapuas Hulu | - | 265.000.000 | 1 meja rapat oval besar, 40 kursi rapat direksi, 6 kursi ess IV ,40 kursi staf, 20 meja staf, 6 set rak arsip besi | 265.000.000 | DAU | 10 buah rak arsip, 10 unit filling kabinet, 3 unit kursi ruang tunggu, 3 set kursi/sofa ruang tamu | 291.500.000 |
| 2 | 18 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan dan mesin lainnya tersedia | Kab. Kapuas Hulu | - | 278.000.000 | 2 unit AC standing, 10 unit AC split, 1 unit LCD 50", 4 kamera CCTV tambahan, 2 unit PC all in 1, 6 unit laptop, 3 unit printer | 278.000.000 | DAU | 10 unit laptop, 6 unit AC split, 2 unit PC all in 1 | 305.800.000 |
| 2 | 18 | 01 | 2.07 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah sarana prasarana disediakan | Kab. Kapuas Hulu | 35.000.000 | - | 1 paket desain interior gedung dan ruang pelayanan | 35.000.000 | DAU | - | 38.500.000 |
| 2 | 18 | 01 | 2.07 | 11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah sarana prasarana pendukung disediakan | Kab. Kapuas Hulu | 45.450.000 | - | 1 paket instalasi & penambahan daya listrik, 1 paket pemindahan jaringan PDAM, 1 paket pemindahan jaringan Telkom & Indihome | 45.450.000 | DAU | - | 49.995.000 |
| | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | | | | | Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju 2023 | | |
|--------|------------|---------|----------|--------------|--|--|--------------------|-----------------|---------------|------------------------|-------------|-----------------|---------------------|------------------------|-------------|
| Urusan | Sub Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | | | Lokasi | Belanja Operasi | Belanja Modal | Target Capaian Kinerja | Pagu | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Pagu |
| 2 | 18 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Prosentase tersedianya jasa penunjang urusan | Kab. Kapuas Hulu | 385.440.000 | - | 100% | 385.440.000 | DAU | | 100% | 423.984.000 |
| 2 | 18 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah surat terkirim | Kab. Kapuas Hulu | 2.640.000 | - | 200 buah | 2.640.000 | DAU | | 200 buah | 2.904.000 |
| 2 | 18 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Terbayarnya tagihan listrik, air, telepon dan internet | Kab. Kapuas Hulu | 66.000.000 | - | 12 bulan | 66.000.000 | DAU | | 12 bulan | 72.600.000 |
| 2 | 18 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Tersedianya jasa pelayanan umum kantor | Kab. Kapuas Hulu | 316.800.000 | - | 12 bulan | 316.800.000 | DAU | | 12 bulan | 348.480.000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 18 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Peosentase barang milik negara dalam kondisi baik | Kab. Kapuas Hulu | 113.600.000 | - | 35 unit | 113.600.000 | DAU | | | 182.960.000 |
| 2 | 18 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas /operasional yang dibayarkan pajaknya | Kab. Kapuas Hulu | 61.600.000 | - | 15 unit | 61.600.000 | DAU | | 20 unit | 67.760.000 |
| 2 | 18 | 01 | 2.09 | 05 | Pemeliharaan Mebel | Jumlah mebel yang dipelihara | Kab. Kapuas Hulu | - | - | 20 unit | - | DAU | | 20 unit | 55.000.000 |
| 2 | 18 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara | Kab. Kapuas Hulu | 32.000.000 | - | 20 unit | 32.000.000 | DAU | | 20 unit | 35.200.000 |
| 2 | 18 | 01 | 2.09 | 08 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara | Kab. Kapuas Hulu | - | - | 1 aset tak berwujud | - | DAU | | 1 aset tak berwujud | - |

| Kode | | | | | Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju 2023 | |
|----------|------------|-----------|----------|--------------|--|--|--------------------|-----------------|-----------------------|------------------------|------|---|---------------------|------------------------|
| Urusan | Sub Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | | | Lokasi | Belanja Operasi | Belanja Modal | Target Capaian Kinerja | Pagu | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja |
| 2 | 18 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah gedung yang dipelihara | Kab. Kapuas Hulu | - | 1 gedung | - | DAU | 1 gedung | - | |
| 2 | 18 | 01 | 2.09 | 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah sarana prasarana gedung yang dipelihara | Kab. Kapuas Hulu | 20.000.000 | 1 prasarana pendukung | 20.000.000 | DAU | 1 paket pemeliharaan prasarama pendukung gedung | 25.000.000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 18 | 02 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | Jumlah dokumen pengembangan iklim penanaman modal | Kab. Kapuas Hulu | 1.223.632.000 | 1 dokumen | 1.223.632.000 | DAU | 1 dokumen | 1.345.995.200 | |
| 2 | 18 | 02 | 2.01 | | Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota | Jumlah dokumen pengkajian/perencanaan /pengusulan | Kab. Kapuas Hulu | 350.000.000 | 1 dokumen | 350.000.000 | DAU | 1 dokumen | - | |
| 2 | 18 | 02 | 2.01 | 01 | Penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemufahan penanaman modal | Jumlah dokumen kebijakan dalam bentuk Perda/Perbup | Kab. Kapuas Hulu | 350.000.000 | 1 dokumen | 350.000.000 | DAU | 1 dokumen | - | |
| 2 | 18 | 02 | 2.01 | 02 | Evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal | Jumlah laporan evaluasi | Kab. Kapuas Hulu | - | 1 laporan | - | DAU | 1 laporan | - | |
| 2 | 18 | 02 | 2.02 | | Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen peta potensi | Kab. Kapuas Hulu | 873.632.000 | 1 dokumen | 873.632.000 | DAU | 1 dokumen | 960.995.200 | |
| 2 | 18 | 02 | 2.02 | 01 | Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen RUPM | Kab. Kapuas Hulu | 506.949.000 | 1 dokumen | 506.949.000 | DAU | 1 dokumen | 557.643.900 | |

| Kode | | | | | Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju 2023 | |
|--------|------------|---------|----------|--------------|---|--|--------------------|-----------------|---------------|------------------------|-------------|-----------------|---------------------|------------------------|
| Urusan | Sub Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | | | Lokasi | Belanja Operasi | Belanja Modal | Target Capaian Kinerja | Pagu | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja |
| 2 | 18 | 02 | 2.02 | 02 | Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen peta potensi/peluang investasi | Kab. Kapuas Hulu | 366.683.000 | | 1 dokumen | 366.683.000 | DAU | 1 dokumen | 403.351.300 |
| 2 | 18 | 03 | | | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | Jumlah minat investor | Kab. Kapuas Hulu | 302.349.000 | - | 2 minat | 302.349.000 | DAU | 2 minat | 332.583.900 |
| 2 | 18 | 03 | 2.01 | | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah laporan promosi penanaman modal | Kab. Kapuas Hulu | 302.349.000 | - | 2 laporan | 302.349.000 | DAU | 2 laporan | 332.583.900 |
| 2 | 18 | 03 | 2.01 | 01 | Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal | Jumlah dokumen strategi promosi | Kab. Kapuas Hulu | 80.000.000 | | 1 dokumen | 80.000.000 | DAU | 1 dokumen | 88.000.000 |
| 2 | 18 | 03 | 2.01 | 02 | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah event promosi diikuti | Kab. Kapuas Hulu | 222.349.000 | - | 3 event | 222.349.000 | DAU | 3 event | 244.583.900 |
| 2 | 18 | 04 | | | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | Prosentase dokumen perizinan diterbitkan sesuai SOP | Kab. Kapuas Hulu | 432,791,160 | - | 100% | 432,791,160 | DAU | 100% | 476,070,276 |
| 2 | 18 | 04 | 2.01 | | Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Rata-rata penyelesaian perizinan diterbitkan | Kab. Kapuas Hulu | 432,791,160 | - | 3-5 hari | 432,791,160 | DAU | 3-5 hari | 476,070,276 |

| Kode | | | | | Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju 2023 | |
|--------|------------|---------|----------|--------------|---|--|--------------------|-----------------|---------------|------------------------|-------------|-----------------|---------------------|------------------------|
| Urusan | Sub Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | | | Lokasi | Belanja Operasi | Belanja Modal | Target Capaian Kinerja | Pagu | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja |
| 2 | 18 | 04 | 2.01 | 01 | Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Prosentase pelaku usaha terlayani sesuai SOP | Kab. Kapuas Hulu | 340,350,200 | - | 100% | 340,350,200 | DAU | 100% | 374,385,220 |
| 2 | 18 | 04 | 2.01 | 02 | Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal | Prosentase pelaku usaha yang memenuhi komitmen | Kab. Kapuas Hulu | 34.585.800 | - | 90% | 34.585.800 | DAU | 90% | 38.044.380 |
| 2 | 18 | 04 | 2.01 | 03 | Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan | Prosentase pengaduan ditindaklanjuti sesuai SOP | Kab. Kapuas Hulu | 28.927.580 | | 100% | 28.927.580 | DAU | 100% | 31.820.338 |
| 2 | 18 | 04 | 2.01 | 04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah | Jumlah dokumen penetapan | Kab. Kapuas Hulu | 28.927.580 | | 1 dokumen | 28.927.580 | DAU | 1 dokumen | 31.820.338 |
| 2 | 18 | 05 | | | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | Prosentase kepatuhan perusahaan menyampaikan LKPM | Kab. Kapuas Hulu | 535.991.500 | - | 50% | 535.991.500 | DAK/DAU | 50% | 589.590.650 |
| 2 | 18 | 05 | 2.01 | | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah perusahaan yang menyampaikan LKPM | Kab. Kapuas Hulu | 535.991.500 | - | 50 perusahaan | 535.991.500 | DAK/DAU | 50 perusahaan | 589.590.650 |
| 2 | 18 | 05 | 2.01 | 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal | Jumlah perusahaan yang wajib LKPM | Kab. Kapuas Hulu | 180.380.200 | - | 50 perusahaan | 180.380.200 | DAU | 50 perusahaan | 198.418.220 |

| Kode | | | | | Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju 2023 | | | | | | | |
|---------------|------------|---------|----------|--------------|--|---|--------------------|-----------------|---------------|------------------------|-------------|-----------------|---------------------|------------------------|------|----------------------|--|--|--|----------------------|
| Urusan | Sub Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | | | Lokasi | Belanja Operasi | Belanja Modal | Target Capaian Kinerja | Pagu | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Pagu | | | | | |
| 2 | 18 | 05 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal | Volume pembinaan penanaman modal | Kab. Kapuas Hulu | 236.921.300 | - | 4 kali | 236.921.300 | DAK | 4 kali | 260.613.430 | | | | | | |
| 2 | 18 | 05 | 2.01 | 03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal | Jumlah laporan pengawasan penanaman modal | Kab. Kapuas Hulu | 118.690.000 | - | 10 laporan | 118.690.000 | DAK | 10 laporan | 130.559.000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 18 | 06 | | | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | Jumlah laporan pengelolaan data dan sistem informasi | Kab. Kapuas Hulu | 478.753.600 | - | 2 dokumen | 478.753.600 | DAU | 2 dokumen | 526,628,960 | | | | | | |
| 2 | 18 | 06 | 2.01 | | Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase sistem informasi perizinan/non perizinan dikelola | Kab. Kapuas Hulu | 478.753.600 | - | 100% | 478.753.600 | DAU | 100% | 526,628,960 | | | | | | |
| 2 | 18 | 06 | 2.01 | 01 | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah penyajian data/informasi pada media cetak dan elektronik | Kab. Kapuas Hulu | 478.753.600 | - | 2 publikasi | 478.753.600 | DAU | 3 publikasi | 526,628,960 | | | | | | |
| Jumlah | | | | | | | | | | | | | | | | 7,471,218,686 | | | | 8,218,340,554 |

BAB V

PENUTUP

Dalam rangka menjamin terlaksananya program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022 serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah- kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh aparaturnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2022 dengan efektif dan efisien.
2. Renja Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan sebagai langkah awal dalam penyusunan anggaran Tahun 2022, dimana Renja Tahun 2022 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran.
3. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, seluruh aparaturnya secara berjenjang, wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja Tahun 2022.
4. Renja Tahun 2022 berlaku sejak tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan evaluasi dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, transparansi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Adapun catatan penting yang menjadi saran bagi perbaikan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu ke depan berdasarkan hasil evaluasi kinerja DPMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2020 adalah :

1. Agar lebih teliti didalam menginput data monitoring kinerja, agar tidak terjadi kesalahan. Serta menjaga sesuaian data kinerja.
2. Melengkapi data pendukung dalam melaksanakan evaluasi kinerja seperti undangan rapat, daftar hadir dan notulen rapat.
3. Seluruh aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu agar meningkatkan integritas, disiplin dan profesionalisme kerja, serta menerapkan sistem, prosedur, dan mekanisme kerja dan standar pelayanan yang jelas, tertib, efisien dan efektif, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan pemanfaatan teknologi dan informasi yang memadai, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi.

Merealisasikan perencanaan yang telah disusun tentu tidak lepas dari dukungan semua pihak terkait. Upaya pembenahan sistem, pengembangan SDM serta peningkatan sarana dan prasarana pelayanan sesuai tuntutan tugas dan harapan masyarakat merupakan suatu tugas besar yang harus segera direalisasikan. Untuk itu, dukungan semua pihak dalam perbaikan sistem dan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu akan sangat diperlukan demi terwujudnya akuntabilitas kinerja, kualitas pelayanan yang lebih baik dan meningkatnya realisasi investasi di daerah.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita Panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan berkat dan rahmat-Nyalah maka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022 dapat diselesaikan. Penyusunan dokumen Rencana Kerja ini merupakan salah satu kewajiban untuk merencanakan program dan kegiatan guna mencapai tujuan dalam menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*), efektif, efisien, bersih dan responsif serta akuntabel.

Rencana kerja tahun 2022 ini disusun dengan memperhatikan tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu dan pencapaian target kinerja yang diharapkan. Rencana Kerja ini juga merupakan upaya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mendukung visi Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu terpilih tahun 2021-2026 yaitu ***“Menuju Kapuas Hulu yang Harmonis, Energik, Berdaya saing, Amanah dan Terampil (HEBAT)”***, dengan didukung beberapa Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat Kapuas Hulu yang harmonis dalam kerukunan kehidupan beragama, budaya dan keamanan;
2. Mewujudkan Kapuas Hulu yang kreatif menuju desa mandiri, pengembangan aktifitas ekonomi yang adil dan pro rakyat, serta ramah investasi;
3. Mewujudkan masyarakat Kapuas Hulu yang berbudaya, mandiri, cerdas dan inovatif dalam meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan yang memiliki daya saing;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, berwibawa dan tersedianya infrastruktur publik yang berbasis transparansi, responsibilitas dan akuntabilitas,

5. Mewujudkan Kapuas Hulu yang sejahtera dalam pelayanan kesehatan dasar yang bermutu bagi masyarakat.

Merealisasikan perencanaan yang telah disusun tentu tidak lepas dari dukungan semua pihak terkait. Upaya pembenahan sistem, pengembangan SDM dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan sesuai tuntutan tugas dan harapan masyarakat merupakan suatu tugas besar yang harus segera direalisasikan. Untuk itu, dukungan semua pihak dalam perbaikan sistem dan kinerja DPMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu akan sangat diperlukan demi terwujudnya akuntabilitas kinerja, kualitas pelayanan yang lebih baik dan meningkatnya realisasi investasi di daerah.

Renawal Rencana Kerja ini merupakan dokumen yang dinamis sehingga memungkinkan untuk dilakukan perubahan-perubahan dan perbaikan-perbaikan yang dianggap strategis dan sejalan dengan perkembangan pembangunan daerah.

Putussibau, Oktober 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. Kapuas Hulu,

DIDIK WIDIYANTO, S.Sos., M.A.P

Pembina Utama Muda
NIP 19700312 199101 1 001

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| KATA PENGANTAR..... | i |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2. Landasan Hukum | 2 |
| 1.3. Maksud dan Tujuan | 4 |
| 1.4. Sistematika Penulisan | 5 |
| BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 | 7 |
| 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah | 7 |
| 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah | 18 |
| 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.. | 21 |
| 2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD | 22 |
| 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat | 32 |
| BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH..... | 33 |
| 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional..... | 33 |
| 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 35 |
| 3.3. Program dan Kegiatan | 38 |
| BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... | 45 |
| BAB V PENUTUP | 63 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Pusat dan Daerah yang mengamanatkan tentang penyusunan rencana kerja satuan kerja perangkat daerah sebagai perencanaan tahunan dan menjadi dasar penyusunan rencana kerja anggaran perangkat daerah. Dokumen Renja mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan pembangunan jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Rencana Kerja perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah yang berisi program-program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam kurun waktu satu tahun berjalan. Di dalamnya juga memuat kebijakan, permasalahan-permasalahan yang belum dapat diselesaikan dan program-program serta kegiatan sebagai penjabaran RPJMD dan Renstra DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu 2021-2026 .

Dengan disusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), diharapkan dapat lebih menjamin konsistensi perencanaan dan juga sebagai pedoman pelaksanaan program pembangunan secara berkesinambungan dan sinergi dengan program-program OPD lainnya.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 27 tahun 1959 tentang tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Negara Nomor 352);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);

11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 05 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2028;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011 - 2031;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014-2034;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu No. 20 Tahun 2015 tentang Penetapan Kabupaten Kapuas Hulu Sebagai Kabupaten Konservasi;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2022 ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022. Sedangkan tujuan dari Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021-2026;
- b. Merumuskan program dan kegiatan prioritas sebagai tindak lanjut dari permasalahan yang terjadi pada tahun lalu dan yang akan terjadi pada tahun mendatang;
- c. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mendukung program Pemerintah Daerah;
- d. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
- e. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;
- f. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat, serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran kegiatan.
- g. Untuk memberikan arah serta sebagai pedoman dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2022.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan penyajian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Kegiatan evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2020 ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu serta hambatan dan permasalahan yang terjadi.

Pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat dari laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Sedangkan laporan keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Anggaran Tahun 2020 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu dengan penyerapan anggaran dinas yang ditargetkan 95% sampai dengan triwulan IV terealisasi sebesar 98,52% atau sebesar Rp. 3.378.224.448,00 (*tiga milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah*) dari total anggaran dinas sebesar Rp. 3.428.834.300, 00 (*tiga milyar empat ratus dua puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus rupiah*), dengan total

realisasi belanja langsung sebesar Rp. 1.516.094.198,00 (*satu milyar lima ratus enam belas juta sembilan puluh empat ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah*) atau sebesar 99,61% dari total anggaran belanja langsung sebesar Rp. 1.522.018.300,00 (*satu milyar lima ratus dua puluh dua juta delapan belas ribu tiga ratus rupiah*) ,sedangkan realisasi belanja tidak langsung adalah sebesar Rp. 1.862.130.250,00 (*satu milyar delapan ratus enam puluh dua juta serratus tiga puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah*) atau 97,66% dari total anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.906.816.000,00 (*satu milyar sembilan ratus enam juta delapan ratus enam belas ribu rupiah*).

Realisasi anggaran tersebut mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun sebelumnya yang hanya sebesar 96,81% dari total alokasi anggaran yang tersedia. Hal ini menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun DPMPSTSP Kab. Kapuas Hulu senantiasa berusaha untuk melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga seluruh anggaran dapat terserap maksimal.

Realisasi kegiatan yang telah dilaksanakan di tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam perjanjian kinerja DPMPSTSP Kab. Kapuas Hulu, adalah sebagai berikut :

1. Hasil pelaksanaan kegiatan pada Bagian Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dijabarkan sebagai berikut :
 - a. Sasaran meningkatnya kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sudah terrealisasi dengan telah disampaikannya hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kab. Kapuas Hulu dengan nilai "BB" . Adapun nilai evaluasi pelayanan publik oleh Ombudsman di tahun 2020 tidak dilakukan penilaian. Penilaian dilakukan kembali di tahun 2021 melalui pengisian kuisioner secara daring dan kunjungan langsung oleh Ombudsman.

- b. Sasaran meningkatnya sarana dan prasarana aparatur dengan indikator kinerja prosentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik yang ditargetkan 90% sampai dengan akhir tahun 2020 ini terealisasi dengan prosentase 92% (baik).
 - c. Sasaran meningkatnya disiplin aparatur dengan indikator kinerja prosentase kehadiran pegawai dalam 1 tahun yang ditargetkan 92,5% di triwulan IV terrealisasi 100%. Realisasi kehadiran pegawai dalam 1 tahun ini harus dipertahankan dan ditingkatkan agar jangan sampai menurun di tahun-tahun berikutnya.
 - d. Sasaran meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan indikator kinerja nilai LAKIP OPD belum dilakukan penyusunan, namun diharapkan dapat diselesaikan tepat waktu. Sedangkan penyerapan anggaran dinas yang ditargetkan 95% sampai dengan triwulan IV dapat terrealisasi sebesar 98,52% atau berhasil memenuhi target kinerja.
 - e. Memastikan segala sarana prasarana kerja dan keperluan rutin Dinas dalam keadaan baik dan terpenuhi segala kebutuhan rutin Dinas merupakan tugas pokok yang harus dijalankan pada Bagian Sekretariat.
2. Hasil pelaksanaan kegiatan pada Bidang Penanaman Modal dapat dilaporkan sebagai berikut :
- a. Untuk kegiatan Pemantauan ,Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal, hasil yang dicapai yaitu melaksanakan kegiatan pengendalian penanaman modal dengan indikator jumlah perusahaan yang dilakukan pemantauan, pembinaan dan pengawasan terlaksana dengan jumlah perusahaan sebanyak 65 perusahaan, atau melampaui target yang sudah ditetapkan.

- b. Pada kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi Daerah, meskipun tidak dapat merealisasikan keikutsertaan pada kegiatan pameran promosi penanaman modal dikarenakan pandemi yang sedang terjadi, namun berhasil merealisasikan minat investor yang berencana untuk berinvestasi di Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 1 (satu) minat.
 - c. Kegiatan Pengelolaan SIPID merupakan upaya untuk menyajikan data dan informasi potensi dan peluang investasi daerah secara terpadu, lengkap dan akurat kepada publik, khususnya calon investor. Dengan memberikan informasi yang diperlukan oleh calon investor ini, mereka dapat menentukan pilihan dari berbagai alternative peluang investasi yang ada melalui aplikasi SIPID.
 - d. Mengikuti kegiatan Rakornas Investasi yang merupakan kegiatan Koordinasi Teknis Perencanaan yang berkaitan dengan perencanaan dan pengembangan penanaman modal Nasional. Pada tahun 2020 ini kegiatan rapat koordinasi yang diikuti hanya di tingkat Nasional mengingat pandemi Covid-19 yang sedang terjadi di Indonesia.
3. Adapun laporan pelaksanaan kegiatan dari Bidang Pelayanan dan Informasi Penanaman Modal adalah sebagai berikut :
- a. Sasaran meningkatnya pelayanan perizinan dan non perizinan dengan indikator kinerja rata-rata waktu penyelesaian perizinan dan non perizinan yang ditargetkan 3-5 hari sudah terealisasi 100%. Realisasi rata-rata waktu penyelesaian perizinan dan non perizinan ini harus dipertahankan dan ditingkatkan sehingga di tahun-tahun berikutnya tidak terjadi penurunan dan tetap terealisasi 100%.
 - b. Sasaran meningkatkan kualitas pelayanan yang diselenggarakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kapuas Hulu dengan

indikator kinerja nilai SKM yang ditargetkan 79 (Baik) terealisasi dengan nilai 87,78 (Baik). Realisasi nilai SKM ini berasal dari total 118 responden sebagai sampel yang merupakan pengunjung DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu, dimana maksud kunjungan mereka untuk mendapatkan layanan perizinan dan non perizinan.

- c. Jumlah izin tervalidasi melalui aplikasi OSS dan SiCantik selama tahun 2020 sebanyak 701 izin dengan nilai realisasi investasi sebesar Rp. 81.033.824.000,00 (*delapan puluh satu milyar tiga puluh tiga juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah*). Nilai realisasi ini terutama berasal dari 14 sektor PMDN dimana penerbitan izinnya dikelola oleh DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu. Termasuk didalamnya 9 izin mendirikan bangunan (IMB) yang baru mulai bulan Oktober 2020 penerbitan izinnya dikelola oleh DPMPTSP.

Adapun repaitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.1

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020
Kabupaten Kapuas Hulu**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

| Kode | Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|---|-----|------|-----|-----|------|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 | Tingkat Realisasi (%) | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 = (5+7+9) | 11 | | | | | |
| | Urusan | | | | | | | | | | | | | | |
| | Bidang Urusan | | | | | | | | | | | | | | |
| | PENANAMAN MODAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 02 | 12 | 01 | 01 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | | | | |
| | | | | | Kegiatan : | | | | | | | | | | |
| 1 | 02 | 12 | 01 | 01 | 001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah materai / perangko | 300 | 200 | 200 | 200 | 100% | 200 | 600 | 100% |
| 1 | 02 | 12 | 01 | 01 | 002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah bulan | 12 | 12 | 12 | 12 | 100% | 12 | 48 | 100% |
| 1 | 02 | 12 | 01 | 01 | 006 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional | Jumlah kendaraan dinas yang dibayarkan pajak / Tahun | 18 | 11 | 11 | 11 | 100% | 12 | 12 | 100% |
| 1 | 02 | 12 | 01 | 01 | 007 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Jumlah Orang yang dibayar honorarium pengelola keuangan dan jasa operator | 16 | 16 | 16 | 16 | 100% | 16 | 96 | 100% |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan | |
|-------------------|--|---|--|--|---|--|-----------------------------|---|--|--|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2021) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 = (5+7+9) | 11 |
| 1 02 12 01 01 008 | Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Lingkungan Kantor | Jumlah bulan pemeliharaan lingkungan gedung kantor | 12 | 12 | 12 | 12 | 100% | 12 | 48 | 100% |
| 1 02 12 01 01 009 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah peralatan kantor yang dipelihara / perbaiki | 30 | 17 | 17 | 17 | 100% | 17 | 68 | 100% |
| 1 02 12 01 01 010 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah item alat tulis kantor | 50 | 50 | 50 | 50 | 100% | 50 | 200 | 100% |
| 1 02 12 01 01 011 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah item barang cetak dan pengadaan | 8 | 8 | 8 | 8 | 100% | 8 | 32 | 100% |
| 1 02 12 01 01 012 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen instalasi listrik | 75 | 75 | 75 | 75 | 100% | 75 | 225 | 100% |
| 1 02 12 01 01 015 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Jumlah langganan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan | 7 | 7 | 7 | 7 | 100% | 7 | 28 | 100% |
| 1 02 12 01 01 017 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah makanan dan minuman harian dan rapat kantor | 4.720 | 6.163 | 6.163 | 6.163 | 100% | 6.163 | 18.489 | 100% |
| 1 02 12 01 01 018 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Jumlah paket rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | 44 | 45 | 45 | 45 | 100% | 50 | 180 | 100% |
| 1 02 12 01 01 019 | Rapat-rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah | Jumlah Paket rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah | 42 | 42 | 42 | 42 | 100% | 45 | 129 | 100% |
| 1 02 12 01 01 022 | Pengelolaan kearsipan di lingkungan SKPD | Jumlah paket kearsipan yang dikelola | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 4 | 100% |
| 1 02 12 01 01 026 | Penyediaan administrasi pengadaan barang dan jasa | Jumlah orang yang bayar honorarium | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% | 5 | 12 | 100% |

| Kode | | | | | | Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019 | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan | |
|------|----|----|----|----|-----|---|--|--|---|--|---|-----------------------|---|--|--|
| | | | | | | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2021) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 = (5+7+9) | 11 |
| 1 | 02 | 12 | 01 | 01 | 027 | Peaksanaan administrasi kepegawaian di lingkungan SKPD | Jumlah dokumen | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% |
| 1 | 02 | 12 | 01 | 01 | 031 | Penyusunan RKA, DPA dan DPPA | Jumlah dokumen | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% | 3 | 12 | 100% |
| 1 | 02 | 12 | 01 | 01 | 036 | Penyediaan Jasa Pendukung perkantoran | Jumlah pegawai honorer yang dibayarkan honorarium | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% | 5 | 12 | 100% |
| 1 | 02 | 12 | 01 | 01 | 042 | Monitoring dan evaluasi kegiatan dinas | Jumlah paket monev | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 4 | 12 | 100% |
| 1 | 02 | 12 | 01 | 02 | | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | | | | | |
| | | | | | | Kegiatan : | | | | | | | | | |
| 1 | 02 | 12 | 01 | 02 | 05 | Pengadaan kendaraan dinas/opersional | Jumlah kendaraan dinas /operasional yang diadakan | 12 | 3 | 3 | 3 | 25% | 0 | 3 | 25% |
| 1 | 02 | 12 | 01 | 02 | 09 | Penyediaan sarana pendukung kantor | Jumlah paket penyediaan sarana pendukung kantor | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% |
| 1 | 02 | 12 | 01 | 02 | 024 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara | 12 | 12 | 12 | 12 | 100% | 2 | 12 | 100% |
| 1 | 02 | 12 | 01 | 03 | | Peningkatan Disiplin Aparatur | | | | | | | | | |
| | | | | | | Kegiatan : | | | | | | | | | |
| 1 | 02 | 12 | 01 | 03 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas dan perlengkapannya | Jumlah pakaian dinas | 27 | 27 | - | - | 100% | 30 | 87 | 100% |
| 1 | 02 | 12 | 01 | 03 | 05 | Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu | Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu | 27 | - | 27 | 27 | 100% | - | 57 | 100% |
| 1 | 02 | 12 | 01 | 05 | | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | | |

| Kode | | | | | | Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan | |
|------|----|----|----|----|-----|--|--|--|--|---|--|-----------------------------|---|---|--|
| | | | | | | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2021) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 = (5+7+9) | 11 |
| 1 | 16 | 02 | 01 | 05 | 001 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal | 16 | 16 | 16 | 16 | 100% | 12 | 64 | 100% |
| 1 | 02 | 12 | 01 | 06 | | Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | | | | | | | |
| | | | | | | Kegiatan : | | | | | | | | | |
| 1 | 02 | 12 | 01 | 06 | 001 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar relaisasi kinerja | Jumlah dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 4 | 100% |
| 1 | 02 | 12 | 01 | 06 | 002 | Penyusunan pelaporan Keuangan Semesteran SKPD dan prognosis realisasi anggaran | Jumlah dokumen | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | 2 | 8 | 100% |
| 1 | 02 | 12 | 01 | 06 | 004 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | Jumlah dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 4 | 100% |
| 1 | 02 | 12 | 01 | 06 | 016 | Penyusunan standar operasional prosedur (SOP) SKPD | Jumlah dokumen | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 | 40 | 100% |
| 1 | 02 | 12 | 01 | 06 | 026 | Pendataan dan pengelolaan aset SKPD | Jumlah dokumen | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | 2 | 8 | 100% |
| 1 | 02 | 12 | 01 | 06 | 030 | Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahunan SKPD | Jumlah dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 4 | 100% |
| 1 | 02 | 12 | 01 | 06 | 036 | Penyusunan Rencana Kerja SKPD | Jumlah dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 4 | 100% |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan | |
|-------------------|--|--|--|--|---|--|-----------------------------|---|--|---|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2021) | tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 = (5+7+9) | 11 |
| 1 02 12 01 06 042 | Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Jumlah dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 4 | 100% |
| 1 02 12 01 06 047 | Penyusunan laporan tahunan | Jumlah dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 4 | 100% |
| 1 02 12 01 06 048 | Penyusunan laporan reformasi birokrasi | Jumlah dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 4 | 100% |
| 1 02 12 01 15 | Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi | | | | | | | | | |
| | Kegiatan : | | | | | | | | | |
| 1 02 12 01 15 013 | Penyelenggaraan Pameran Investasi Daerah | Jumlah event pameran yang diikuti | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | 2 | 8 | 100% |
| 1 02 12 01 15 015 | Pengelolaan sistem informasi potensi investasi daerah (SIPID) | Jumlah kegiatan up date data | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | 2 | 8 | 100% |
| 1 02 12 01 15 019 | Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal | Jumlah perusahaan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan | 45 | 45 | 45 | 45 | 100% | 45 | 180 | 100% |
| 1 02 12 01 16 | Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi | | | | | | | | | |
| | Kegiatan : | | | | | | | | | |
| 1 02 12 01 16 013 | Sosialisasi Peraturan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kab. Kapuas Hulu | Jumlah Kecamatan yang mendapatkan sosialisasi | 6 | 6 | - | - | 100% | - | 6 | 100% |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan | | | | | | |
|------|--|--|--|--|---|--|--|---|--|--|---|------|---|----|------|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2021) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 = (5+7+9) | 11 | | | | | |
| 1 | 02 | 12 | 01 | 16 | 020 | Rapat koordinasi teknis perencanaan dan pengembangan penanaman modal | Jumlah paket rapat teknis perencanaan dan pengembangan penanaman modal | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% | 3 | 12 | 100% |
| 1 | 02 | 12 | 01 | 16 | 019 | Penyusunan Peta Potensi Investasi Daerah Kab. Kapuas Hulu | Jumlah dokumen | - | 1 | - | - | 100% | - | 1 | 100% |
| 1 | 02 | 12 | 01 | 16 | 021 | Penyusunan ICOR Kab. Kapuas Hulu | Jumlah dokumen | - | - | 1 | 1 | 100% | - | 1 | 100% |
| 1 | 02 | 12 | 01 | 19 | | Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan | | | | | | | | | |
| | | | | | | Kegiatan : | | | | | | | | | |
| 1 | 02 | 12 | 01 | 19 | 001 | Pengawasan dan Pengendalian Perizinan dan Non Perizinan | Jumlah Kecamatan yang dilakukan pengawasan | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% | 4 | 12 | 100% |
| 1 | 02 | 12 | 01 | 19 | 013 | Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) | Jumlah laporan | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 4 | 100% |
| 1 | 02 | 12 | 01 | 19 | 014 | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Keliling | Jumlah Kecamatan yang mendapatkan pelayanan keliling | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 4 | 100% |
| 1 | 02 | 12 | 01 | 19 | 017 | Penataan perizinan | Jumlah dokumen | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% | 3 | 12 | 100% |
| 1 | 02 | 12 | 01 | 19 | 019 | Publikasi dan informasi perizinan dan non perizinan | Jumlah publikasi | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | 2 | 8 | 100% |
| 1 | 02 | 12 | 01 | 19 | 020 | Penyusunan laporan perkembangan PTSP Kabupaten | Jumlah laporan | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 4 | 100% |

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi : membina, mengkoordinasikan, merencanakan serta menetapkan program kerja, tata kerja dan pengembangan semua kegiatan di bidang penanaman modal dan perizinan serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. Pelaksana urusan pemerintah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. Pelaksana evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

Adapun pencapaian kinerja maupun hal-hal yang menjadi kekuatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu adalah :

1. Adanya peningkatan disiplin dan kinerja;
2. Adanya upaya peningkatan pelaksanaan penataan peraturan perundang-undangan;
3. Adanya upaya pelaksanaan pengidentifikasian terhadap tumpang tindihnya tugas dan fungsi, sehingga terjadi peningkatan efisiensi dan efektivitas kinerja;
4. Adanya standar pelayanan sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan terukur serta

berkepastian dan transparan;

5. Manajemen Sumber Daya Manusia dilakukan secara obyektif, adil, transparan dan akuntabel;
6. Budaya dan tingkat akuntabilitas kinerja birokrasi semakin meningkat;
7. Penyampaian pelaporan LHKPN dan LHKASN yang tertib;
8. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam menunjang kegiatan semakin meningkat, sehingga proses birokrasi menjadi lebih efisien, efektif dan transparan serta memberi kemudahan bagi pemangku kepentingan dan masyarakat untuk mendapatkan dan mengakses informasi.

Beberapa permasalahan pada DPMPSTSP Kabupaten Kapuas Hulu yang masih memerlukan penyelesaian lebih lanjut, diantaranya :

- 1) belum memadainya fasilitas dan sarana prasarana pelayanan dan perkantoran;
- 2) terbatasnya alokasi anggaran yang tersedia;
- 3) terbatasnya tenaga teknis untuk pelayanan perizinan dan non perizinan;
- 4) belum maksimalnya penerapan standar pelayanan minimal bidang pelayanan perizinan dan non perizinan.

Penyelesaian terhadap permasalahan tersebut diharapkan akan memberikan dampak pada peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat serta meningkatkan nilai investasi di daerah.

Sedangkan pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu, dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kapuas Hulu

| No | Indikator | SPM / Standar Nasional | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Analisis |
|-----|--|------------------------------|-----|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
| | | | | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1. | Predikat SAKIP | | | CC | B | B | BB | BB | BB | BB | A | |
| 2. | Nilai Survei Kepuasan Masyarakat | | | 77 | 78 | 79 | 80 | 83,71 | 85,32 | 79 | 80 | |
| 3. | Nilai realisasi investasi PMDAN (Milyar rupiah) | | | 173 | 226 | 299 | 398 | 607.50 | 546,57 | 398 | 398 | |

Berdasarkan tabel di atas, dapat dianalisa sebagai berikut :

- a) Sasaran meningkatkan akuntabilitas kinerja pada Renstra DPMPSTSP Kabupaten Kapuas Hulu, dengan indikator kinerja predikat SAKIP “B”, terealisasi dengan predikat “BB” untuk penilaian kinerja tahun 2018. Penilaian SAKIP DPMPSTSP tahun 2020 terealisasi dengan predikat “BB” dengan poin 78,19.
- b) Sasaran meningkatkan kualitas pelayanan yang diselenggarakan DPMPSTSP Kabupaten Kapuas Hulu dengan indikator kinerja nilai survei kepuasan masyarakat (SKM) yang ditargetkan dengan nilai 79 (baik), terealisasi dengan nilai 85,32 (baik) dengan jumlah responden sebanyak 118 orang responden.
- c) Sasaran meningkatkan realisasi investasi di daerah dengan indikator kinerja realisasi investasi yang ditargetkan sebesar 299 Milyar terealisasi sebesar 546,57 Milyar atau sebesar 183%. Nilai realisasi investasi tersebut berasal dari izin tervalidasi OSS dan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) yang telah divalidasi oleh BKPM. Nilai realisasi investasi ini memang menurun dari tahun sebelumnya mengingat kondisi perekonomian Indonesia yang mengalami resesi serta pandemi covid-19 yang masih melanda menyebabkan

investasi berjalan sangat lambat. Namun, dengan kondisi saat ini yang semakin membaik akan diharapkan akan berdampak pula terhadap realisasi investasi di daerah.

Dari hasil analisa di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu sebagai penyelenggara pemerintah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu telah menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan efektif dan efisien, serta mampu memberikan kontribusi terhadap tercapainya misi ke 2 daerah yaitu **memperkuat ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada sumber daya daerah yang berkelanjutan.**

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal terdapat beberapa permasalahan yang menjadi tantangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut :

1. **Belum lengkapnya dokumen perencanaan pengembangan investasi daerah.** Hal ini berpengaruh terhadap rencana pengembangan investasi di daerah. Karena dengan adanya dokumen perencanaan pengembangan investasi yang lengkap dan disertai data-data yang akurat akan memudahkan para pemangku kepentingan untuk mengambil kebijakan yang menggerakkan perekonomian daerah dengan menarik datangnya investor untuk berinvestasi di Kabupaten Kapuas Hulu.
2. **Belum optimalnya upaya promosi daerah.** Hal ini berpengaruh terhadap upaya DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu untuk mempromosikan peluang investasi yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu agar lebih dikenal luas, terutama di kalangan investor potensial. Kurangnya pemahaman akan konsep promosi investasi juga

merupakan kendala dalam melaksanakan promosi investasi daerah.

3. **Belum optimalnya pelayanan perizinan berusaha.** Hal ini disebabkan masih belum memadainya sarana dan prasarana pelayanan perizinan yang ada, serta masih kurangnya kuantitas, kualitas dan kompetensi tenaga teknis yang menjadi ujung tombak pelayanan perizinan berusaha DPMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu.
4. **Belum optimalnya fungsi pengendalian penanaman modal dan perizinan berusaha.** Hal ini berpengaruh terhadap jumlah perusahaan yang tertib administrasi dengan melaporkan perkembangan investasinya melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) serta masih banyaknya jumlah pemilik usaha yang belum memenuhi komitmen.

2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu dan Renstra DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu tahun 2016-2021. Rancangan awal RKPD merupakan dokumen yang disusun sebagai pedoman seluruh perangkat daerah dalam menyusun rancangan awal Renja perangkat daerah dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif. Terdapat beberapa perubahan (penambahan dan pengurangan) terhadap Program dan Kegiatan yang disusun berdasarkan dokumen Rancangan Awal RKPD. Hasil analisis kebutuhan menunjukkan perlunya penambahan beberapa kegiatan. Perubahan tersebut didasari oleh :

1. Amanat Permendagri 86 Tahun 2017 terkait waktu dan mekanisme perubahan RPJP dan RPJMD;
2. Penyesuaian terhadap RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022-2026, yang mengakomodir visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih baru;

3. Adanya perubahan peraturan tentang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu di tingkat Nasional;
4. Adanya perubahan peraturan tentang penyusunan anggaran keuangan daerah yang juga mempengaruhi pengurangan atau penambahan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan DPMPTSP di tahun 2022;
5. Adanya dana alokasi khusus (DAK) non fisik berupa Dana Fasilitas Penanaman Modal di tahun anggaran 2021 yang diperuntukkan bagi kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.

Adapun rewiu terhadap Rancangan Awal RKPD disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.3

Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2021
Kabupaten Kapuas Hulu

| No. | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|-----|---|------------------|---|--------------------------------------|-----------------------|--|------------------|---|--------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| | Program / Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.0) | Program / Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp.0) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 1. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | Rp. 1.410.237.000 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | Rp 1.186.149.400 | |
| | Penyediaan jasa surat menyurat > Belanja materai / perangko | Kab. Kapuas Hulu | Tersediannya materai | 300 Materai | Rp 1.500.000 | Penyediaan jasa surat menyurat > Belanja materai / perangko | Kab. Kapuas Hulu | Tersediannya materai | 300 Materai | Rp 1.300.000 | |
| | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik > Belanja telepon, air, listrik dan internet | Kab. Kapuas Hulu | Tersedianya Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik | 12 Bulan | Rp 35.420.000 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik > Belanja telepon, air, listrik dan internet | Kab. Kapuas Hulu | Tersedianya Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik | 12 Bulan | Rp 64.200.000 | |
| | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional > Pembayaran pajak kendaraan dinas | Kab. Kapuas Hulu | Terbayarnya pajak kendaraan dinas operasional | Pajak 2 Unit mobil dan 12 unit motor | Rp 4.500.000 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional > Pembayaran pajak kendaraan | Kab. Kapuas Hulu | Terbayarnya pajak kendaraan dinas operasional | Pajak 1 Unit mobil dan 12 unit motor | Rp 4.250.000 | |
| | Penyediaan jasa administrasi keuangan > Pembayaran honorarium pengelola keuangan dan jasa operator | Kab. Kapuas Hulu | Terbayarnya jasa pengelolaan keuangan dan operator | 16 Orang | Rp 76.098.000 | Penyediaan jasa administrasi keuangan > Pembayaran honorarium pengelola keuangan dan jasa operator | Kab. Kapuas Hulu | Terbayarnya jasa pengelolaan keuangan dan operator | 16 Orang | Rp 90.180.000 | |

| No. | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|-----|--|------------------|--|---|-----------------------|--|------------------|--|---|-----------------------|-----------------|
| | Program / Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.0) | Program / Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp.0) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | Penyediaan jasa pengamanan dan kebersihan kantor > - | Kab. Kapuas Hulu | Terpeliharanya lingkungan gedung kantor | 1 Tahun | Rp 29.312.000 | Penyediaan jasa pengamanan dan kebersihan kantor > - | Kab. Kapuas Hulu | Terpeliharanya lingkungan gedung kantor | 1 Tahun | Rp 56.011.600 | |
| | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja > - | Kab. Kapuas Hulu | Terpeliharanya peralatan kantor | 20 Unit | Rp 21.600.000 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja > - | Kab. Kapuas Hulu | Terpeliharanya peralatan kantor | 20 Unit | Rp 20.000.000 | |
| | Penyediaan alat tulis kantor > - | Kab. Kapuas Hulu | Tersedianya alat tulis kantor | 50 Item | Rp 42.457.000 | Penyediaan alat tulis kantor > - | Kab. Kapuas Hulu | Tersedianya alat tulis kantor | 50 Item | Rp 50.000.000 | |
| | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan > - | Kab. Kapuas Hulu | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan | 8 Item | Rp 14.850.000 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan > - | Kab. Kapuas Hulu | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan | 8 Item | Rp 17.503.000 | |
| | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan | Kab. Kapuas Hulu | Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor | 75 Buah | Rp 3.000.000 | Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan | Kab. Kapuas Hulu | Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor | 75 Buah | Rp 7.932.000 | |
| | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor > - | Kab. Kapuas Hulu | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor | 4 Unit Laptop, 4 Unit Tablet, 1 Set Sound Sistem, 10 Unit Printer | Rp 250.000.000 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor > - | Kab. Kapuas Hulu | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor | 4 Unit Leptop, 4 Unit Tablet, 1 Set Sound Sistem, 10 Unit Printer | Rp 90.850.000 | |
| | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan > - | Kab. Kapuas Hulu | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 6 Surat kabar, 10 Kali Iklan | Rp 18.000.000 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan > - | Kab. Kapuas Hulu | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 6 Surat kabar, 10 Kali Iklan | Rp 19.360.000 | |
| | Kegiatan penunjang pemerintah | , Tentative | Terlaksananya kegiatan penunjang pemerintah lainnya | 1 Tahun | Rp 30.000.000 | Kegiatan penunjang pemerintah | , Tentative | Terlaksananya kegiatan penunjang pemerintah lainnya | 1 Tahun | - | |
| | Penyediaan makanan dan minuman > - | Kab. Kapuas Hulu | Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai dan rapat kantor | 4.720 makanan dan minuman | Rp 54.000.000 | Penyediaan makanan dan minuman > - | Kab. Kapuas Hulu | Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai dan rapat kantor | 4.720 makanan dan minuman | Rp 69.600.000 | |

| No. | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|-----|---|------------------|---|----------------|-------------------------|---|------------------|---|----------------|-----------------------|-----------------|
| | Program / Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.0) | Program / Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp.0) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah > - | , Tentative | Terlaksananya rapat-rapat koordinasi keluar daerah | 50 kali | Rp 466.000.000 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah > | , Tentative | Terlaksananya rapat-rapat koordinasi keluar daerah | 50 kali | Rp 455.000.000 | |
| | Rapat-rapat koordinasi dan kunjungan kerja dalam daerah > - | , Tentative | Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan kunjungan kerja dalam daerah | 30 Kali | Rp 110.000.000 | Rapat-rapat koordinasi dan kunjungan kerja dalam daerah > - | , Tentative | Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan kunjungan kerja dalam daerah | 30 Kali | Rp 75.000.000 | |
| | Penyediaan administrasi pengadaan barang dan jasa > - | Kab. Kapuas Hulu | Tersediannya honorarium pengadaan barang dan jasa | 3 Orang | Rp 3.500.000 | Penyediaan administrasi pengadaan barang dan jasa | Kab. Kapuas Hulu | Tersediannya honorarium pengadaan barang dan jasa | 3 Orang | Rp 5.863.000 | |
| | Penyusunan RKA dan DPA > - | Kab. Kapuas Hulu | Tersusunnya RKA, DPA dan DPPA SKPD | 3 Dokumen | Rp 5.000.000 | Penyusunan RKA dan DPA > - | Kab. Kapuas Hulu | Tersusunnya RKA, DPA dan DPPA SKPD | 3 Dokumen | Rp 5.767.000 | |
| | Penyediaan jasa pendukung kantor > - | Kab. Kapuas Hulu | Tersediannya jasa tenaga kontrak | 5 Orang | Rp 77.000.000 | Penyediaan jasa pendukung kantor > - | Kab. Kapuas Hulu | Tersediannya jasa tenaga kontrak | 5 Orang | Rp 101.997.000 | |
| | Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas > - | Kab. Kapuas Hulu | Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas | 20 Kali | Rp 168.000.000 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas > - | Kab. Kapuas Hulu | Terlaksananya monitoring, evaluasi kegiatan dan pelaporan dinas | 4 Kali | Rp 25.000.000 | |
| 2. | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | | 0 | | Rp 1.711.700.000 | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | | 0 | | Rp 55.606.800 | |
| | Pengadaan kendaraan dinas/operasional> - | Kab. Kapuas Hulu | Tersediannya kendaraan dinas/operasional kantor | 1 Unit mobil | Rp 300.000.000 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional >- | Kab. Kapuas Hulu | Tersediannya kendaraan dinas/operasional kantor | - | - | |
| | Perencanaan pembangunan gedung kantor>- | Kab. Kapuas Hulu | Tersediannya Perencanaan pembangunan gedung kantor | 1 Paket | Rp 250.000.000 | Perencanaan pembangunan gedung kantor>- | Kab. Kapuas Hulu | Tersediannya Perencanaan pembangunan gedung kantor | - | - | |

| No. | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|-----|---|------------------|---|---|-----------------------|---|------------------|---|---|-----------------------|-----------------|
| | Program / Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.0) | Program / Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp.0) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor | Kab. Kapuas Hulu | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor | 2 set kursi tamu, 10 buah kursi dan meja kerja eselon, 5 set kursi tunggu | Rp 200.000.000 | Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor | Kab. Kapuas Hulu | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor | 1 unit lemari, 3 unit filling cabinet, 1 unit tangga, 5 unit notebook, 6 unit printer, 2 unit scanner, 4 unit kursi, 10 unit kursi staf, 5 unit rak buku, 1 unit kamera | Rp. 114.451.000 | |
| | Pengadaan perlengkapan gedung kantor > Pembangunan tempat parkir | Kab. Kapuas Hulu | Tersedianya tempat parkir kendaraan | 1 Paket | Rp 200.000.000 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor > Pembangunan tempat parkir | Kab. Kapuas Hulu | Tersedianya tempat parkir kendaraan | - | - | |
| | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor > - | Kab. Kapuas Hulu | Terpeliharanya gedung kantor | 1 Paket | Rp 150.000.000 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor > - | Kab. Kapuas Hulu | Terpeliharanya gedung kantor | - | - | |
| | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional> - | Kab. Kapuas Hulu | Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional | 2 Unit mobil, 8 Unit motor | Rp 100.000.000 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional >- | Kab. Kapuas Hulu | Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional | 2 Unit mobil, 8 Unit motor | Rp 55.606.800 | |
| | Pengadaan peralatan gedung kantor > Penyediaan instalasi jaringan LAN | Kab. Kapuas Hulu | Tersedianya instalasi jaringan LAN | 1 Paket | Rp 139.700.000 | Pengadaan peralatan gedung kantor > Penyediaan instalasi jaringan LAN | Kab. Kapuas Hulu | Tersedianya instalasi jaringan LAN | - | - | |
| | Pembangunan pusat data, server aplikasi dan pengamanan | Kab. Kapuas Hulu | Tersedianya pusat data server aplikasi dan pengamanan | 1 Paket | Rp 350.000.000 | Pembangunan pusat data, server aplikasi dan pengamanan | Kab. Kapuas Hulu | Tersedianya pusat data server aplikasi dan pengamanan | - | - | |
| 3. | Program peningkatan disiplin aparatur | | 0 | | Rp 88.000.000 | Program peningkatan disiplin aparatur | | 0 | | Rp 40.000.000 | |
| | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya >- | Kab. Kapuas Hulu | Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya | 29 Stel | Rp 45.000.000 | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya >- | Kab. Kapuas Hulu | Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya | - | - | |

| No. | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|-----|---|------------------|---|----------------|-----------------------|---|------------------|---|----------------|-----------------------|-----------------|
| | Program / Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.0) | Program / Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp.0) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu >- | Kab. Kapuas Hulu | Tersedianya pakaian khusus hari- hari tertentu | 29 Stel | Rp 43.000.000 | Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu >- | Kab. Kapuas Hulu | Tersedianya pakaian khusus hari- hari tertentu | 29 Stel | Rp 40.000.000 | |
| 4. | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | | 0 | | Rp 395.000.000 | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | | 0 | | Rp 120.000.000 | |
| | Pendidikan dan pelatihan formal >- | Tentative | Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal | 12 Orang | Rp 395.000.000 | Pendidikan dan pelatihan formal | Tentative | Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal | 16 Orang | Rp 120.000.000 | |
| 5 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | | 0 | | Rp 77.300.000 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | | 0 | | Rp 59.578.000 | |
| | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD > - | Kab. Kapuas Hulu | Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 1 Dokumen | Rp 4.500.000 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD > - | Kab. Kapuas Hulu | Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 1 Dokumen | Rp 8.004.000 | |
| | Penyusunan pelaporan keuangan semesteran SKPD > - | Kab. Kapuas Hulu | Tersedianya laporan keuangan semesteran SKPD | 1 Dokumen | Rp 5.000.000 | Penyusunan pelaporan keuangan semesteran SKPD > - | Kab. Kapuas Hulu | Tersedianya laporan keuangan semesteran SKPD | 1 Dokumen | - | |
| | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun > - | Kab. Kapuas Hulu | Tersedianya laporan keuangan akhir tahun | 1 Dokumen | Rp 4.000.000 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun > - | Kab. Kapuas Hulu | Tersedianya laporan keuangan akhir tahun | 1 Dokumen | Rp 5.265.000 | |
| | Penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja SKPD | Kab. Kapuas Hulu | Tersedianya analisis beban kerja dan analisis jabatan | 2 Dokumen | Rp 12.000.000 | Penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja SKPD | Kab. Kapuas Hulu | Tersedianya analisis beban kerja dan analisis jabatan | 2 Dokumen | - | |
| | Penyusunan standar operasional prosedur (SOP) | Kab. Kapuas Hulu | Tersedianya SOP | 10 Dokumen | Rp 22.000.000 | Penyusunan standar operasional prosedur (SOP) | Kab. Kapuas Hulu | Tersedianya SOP | 10 Dokumen | Rp 17.894.000 | |

| No. | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|-----|---|------------------|--|------------------|-----------------------|---|------------------|--|------------------|-----------------------|-----------------|
| | Program / Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.0) | Program / Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp.0) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | Penyusunan rencana tahunan dan penetapan kinerja tahunan SKPD > - | Kab. Kapuas Hulu | Tersedianya rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja tahunan SKPD | 1 Dokumen | Rp 3.000.000 | Penyusunan rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja tahunan SKPD > - | Kab. Kapuas Hulu | Tersedianya rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja tahunan SKPD | 1 Dokumen | Rp 6.189.700 | |
| | Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian SKPD | Kab. Kapuas Hulu | Tersedianya DUK dan Daftar Nominatif Pegawai | 1 Dokumen | Rp 8.000.000 | Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian SKPD | Kab. Kapuas Hulu | Tersedianya DUK dan Daftar Nominatif Pegawai | 1 Dokumen | Rp 7.000.000 | |
| | Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah di SKPD > - | Kab. Kapuas Hulu | Tersedianya LPPD SKPD | 1 Dokumen | Rp 8.000.000 | Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah di SKPD > - | Kab. Kapuas Hulu | Tersedianya LPPD SKPD | 1 Dokumen | - | |
| | penyusunan laporan tahunan > - | Kab. Kapuas Hulu | Tersedianya laporan tahunan SKPD | 1 Dokumen | Rp 7.000.000 | penyusunan laporan tahunan > - | Kab. Kapuas Hulu | Tersedianya laporan tahunan SKPD | 1 Dokumen | - | |
| | Penyusunan Laporan Inventarisasi aset SKPD | Kab. Kapuas Hulu | Tersedianya laporan inventarisasi aset SKPD | 2 Dokumen | Rp 3.800.000 | Penyusunan Laporan Inventarisasi aset SKPD | Kab. Kapuas Hulu | Tersedianya laporan inventarisasi aset SKPD | 2 Dokumen | Rp 1.909.600 | |
| 6 | Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi | | 0 | | Rp 744.000.000 | Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi | | 0 | | Rp 469.334.000 | |
| | Pameran investasi daerah > - | Tentative | Terlaksananya pameran investasi daerah | 3 Minat investor | Rp 290.000.000 | Pameran investasi daerah > - | Tentative | Terlaksananya pameran investasi daerah | 3 Minat investor | Rp 252.308.000 | |
| | Penyusunan data statistik penanaman modal | Kab. Kapuas Hulu | Tersedianya data statistik penanaman modal | 1 Dokumen | Rp 75.000.000 | Penyusunan data statistik penanaman modal | Kab. Kapuas Hulu | Tersedianya data statistik penanaman modal | 1 Dokumen | - | |
| | Pengelolaan sistem informasi potensi investasi daerah (SIPID) | Kab. Kapuas Hulu | Tersedianya informasi potensi investasi daerah (SIPID) | 2 Kegiatan | Rp 20.000.000 | Pengelolaan sistem informasi potensi investasi | Kab. Kapuas Hulu | Tersedianya informasi potensi investasi daerah (SIPID) | 2 Kegiatan | Rp 47.026.000 | |

| No. | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|-----|--|------------------|--|-------------------------------------|-----------------------|--|------------------|--|-------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| | Program / Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.0) | Program / Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp.0) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal > - | , Tentative | Terlaksananya pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal | 45 Perusahaan | Rp 279.000.000 | Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal > - | , Tentative | Terlaksananya pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal | 45 Perusahaan | Rp 170.000.000 | |
| | Penyediaan sarana dan prasarana promosi penanaman modal | Kab. Kapuas Hulu | Tersedianya sarana dan prasarana promosi penanaman modal | 450 Leaflet, 300 brosur, 50 Buah CD | Rp 80.000.000 | Penyediaan sarana dan prasarana promosi penanaman modal | Kab. Kapuas Hulu | Tersedianya sarana dan prasarana promosi penanaman modal | 450 Leaflet, 300 brosur, 50 Buah CD | - | |
| 7 | Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi | | 0 | | Rp 520.000.000 | Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi | | 0 | | Rp 520.000.000 | |
| | Workshop penyusunan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) | Kab. Kapuas Hulu | Terlaksananya workshop penyusunan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) | 30 Perusahaan | Rp 50.000.000 | Workshop penyusunan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) | Kab. Kapuas Hulu | Terlaksananya workshop penyusunan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) | 30 Perusahaan | - | |
| | Sosialisasi kebijakan penanaman modal > - | Kab. Kapuas Hulu | Terlaksananya sosialisasi kebijakan penanaman modal | 50 Perusahaan | Rp 34.000.000 | Sosialisasi kebijakan penanaman modal > - | Kab. Kapuas Hulu | Terlaksananya a sosialisasi kebijakan penanaman modal | 50 Perusahaan | - | |
| | Penyusunan Perubahan Perda PM | Kab. Kapuas Hulu | Terlaksananya penyusunan Perubahan Perda penanaman modal | 1 Dokumen | - | Penyusunan Penyusunan Perubahan Perda PM | Kab. Kapuas Hulu | Terlaksananya penyusunan Perubahan Perda penanaman modal | 1 Dokumen | Rp. 391.406.000 | |
| | Penyusunan Perubahan Perbup RUPM | Kab. Kapuas Hulu | Terlaksananya Penyusunan Perubahan Perbup RUPM | 1 Dokumen | - | Penyusunan Perubahan Perbup RUPM | Kab. Kapuas Hulu | Terlaksananya Penyusunan Perubahan Perbup RUPM | 1 Dokumen | Rp. 350.000.000 | |
| | Rapat koordinasi teknis perencanaan penanaman modal | Tentative | Terlaksananya rapat koordinasi teknis perencanaan penanaman modal | 3 Kali | Rp 85.000.000 | Rapat koordinasi teknis perencanaan penanaman modal | Tentative | Terlaksananya rapat koordinasi teknis perencanaan penanaman modal | 3 Kali | Rp 59.000.000 | |

| No. | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|-----|--|------------------|---|----------------|-----------------------|--|------------------|---|----------------|-----------------------|-----------------|
| | Program / Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.0) | Program / Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp.0) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | Penyusunan Peta Potensi Kab. Kapuas Hulu | Kab. Kapuas Hulu | Terlaksananya Penyusunan Peta Potensi Kapuas Hulu | 1 Dokumen | Rp 200.000.000 | Penyusunan Peta Potensi Kab. Kapuas Hulu | Kab. Kapuas Hulu | Terlaksananya Penyusunan Peta Potensi Kab. Kapuas Hulu | 1 Dokumen | Rp 201.600.000 | |
| 8 | Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan | | 0 | | Rp 688.000.000 | Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan | | 0 | | Rp 688.000.000 | |
| | Pengawasan dan Pengendalian Perizinan dan Non Perizinan > - | , Tentative | Terlaksananya pengawasan dan pengendalian perizinan dan non perizinan | 5 Kecamatan | Rp 178.000.000 | Pengawasan dan Pengendalian Perizinan dan Non Perizinan > - | , Tentative | Terlaksananya pengawasan dan pengendalian perizinan dan non perizinan | 5 Kecamatan | Rp 116.954.600 | |
| | Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Keliling > - | , Tentative | Terlaksananya pelayanan perizinan dan non perizinan keliling Kab. KH | 3 Kecamatan | Rp 234.000.000 | Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Keliling > - | , Tentative | Terlaksananya pelayanan perizinan dan non perizinan keliling Kab. KH | 3 Kecamatan | Rp 55.597.800 | |
| | Penyusunan survey kepuasan masyarakat (SKM) OPD > - | Kab. Kapuas Hulu | Tersedianya SKM OPD | Baik | Rp 87.000.000 | Penyusunan survey kepuasan masyarakat (SKM) OPD > - | Kab. Kapuas Hulu | Tersedianya SKM OPD | Baik | Rp 35.000.000 | |
| | Penataan perizinan > - | Kab. Kapuas Hulu | Terlaksananya penataan perizinan | 1 Dokumen | Rp 64.000.000 | Penataan perizinan > - | Kab. Kapuas Hulu | Terlaksananya penataan perizinan | 1 Dokumen | Rp 74.776.800 | |
| | Fasilitasi dan koordinasi tentang pengaduan masyarakat > - | Kab. Kapuas Hulu | Pengaduan yang ditangani dan ditindaklanjuti | 3 Pengaduan | Rp 25.000.000 | Fasilitasi dan koordinasi tentang pengaduan masyarakat > - | Kab. Kapuas Hulu | Pengaduan yang ditangani dan ditindaklanjuti | 3 Pengaduan | Rp - | |
| | Publikasi dan informasi perizinan dan non perizinan > - | Kab. Kapuas Hulu | Terlaksananya publikasi dan informasi perizinan dan non perizinan | 2 Publikasi | Rp 100.000.000 | Publikasi dan informasi perizinan dan non perizinan >- | Kab. Kapuas Hulu | Terlaksananya publikasi dan informasi perizinan dan non perizinan | 2 Publikasi | Rp 175.000.000 | |

2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Musyawarah perencanaan pembangunan daerah tahun 2022 belum dilaksanakan . Namun berdasarkan tahun–tahun sebelumnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu tidak mendapat masukan program / kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan perizinan berusaha, maupun dari Lembaga Sosial Masyarakat (LSM), asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi ataupun pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bidang penanaman modal merupakan kebijakan yang diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, pelayanan terpadu satu pintu dimaksudkan untuk membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal. Dalam Undang-Undang tersebut, pelayanan terpadu satu pintu diartikan sebagai kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian wewenang dari instansi yang memiliki kewenangan dimana proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat. Pengertian ini berbeda dengan pengertian "pelayanan terpadu satu atap". Dalam Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003, pengertian "pelayanan terpadu satu atap" adalah pola pelayanan yang diselenggarakan dalam satu tempat untuk berbagai jenis pelayanan yang tidak mempunyai keterkaitan proses dan dilayani melalui beberapa pintu, sedangkan "pelayanan terpadu satu pintu" adalah pola pelayanan yang diselenggarakan dalam satu tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang memiliki keterkaitan proses dan dilayani melalui satu pintu.

Pelayanan terpadu satu pintu di tingkat pusat dilakukan oleh lembaga yang berwenang di bidang penanaman modal yang mendapat pendelegasian dari lembaga yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan di tingkat Pusat, Propinsi atau Kabupaten/Kota. Lembaga yang dimaksud disini adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atau Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMDD). Pemerintah mengkoordinasikan kebijakan penanaman modal, baik koordinasi antar instansi Pemerintah, antar instansi Pemerintah dengan Bank Indonesia, antar instansi

Pemerintah dengan Pemerintah Daerah, maupun antar Pemerintah Daerah. Koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal tersebut dilakukan oleh BKPM. Dalam melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu, BKPM harus melibatkan perwakilan secara langsung dari setiap sektor dan daerah terkait dengan pejabat yang mempunyai kompetensi dan kewenangan. Dilihat dari ketentuan-ketentuan dalam Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 di atas, pada tingkat Nasional telah terdapat “payung” bagi pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu. Hal yang berkaitan dengan apa itu pelayanan terpadu satu pintu, tujuan pembentukannya, kelembagaannya, hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah diatur lebih tegas. Ketegasan ini dapat menciptakan kepastian bagi aparat pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan tugasnya, kepastian bagi penanam modal, dan kepastian bagi masyarakat umum. Meskipun demikian, pengaturan ” payung” tersebut tidak akan dapat dilaksanakan tanpa adanya pengaturan mengenai mekanisme dan tata cara pelayanan terpadu satu pintu. Undang-Undang hanya mengatur pelayanan terpadu satu pintu secara umum dan memerintahkan penyusunan Peraturan Presiden untuk mengatur tata cara dan pelaksanaannya.

Adanya Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS), yaitu suatu sistem pemrosesan perizinan terintegrasi secara elektronik, menjadi upaya pemerintah untuk menyederhanakan perizinan berusaha di Indonesia dan menciptakan model pelayanan terintegrasi yang cepat dan murah serta memberi kepastian. Dengan adanya OSS ini, masyarakat dapat mengakses layanannya secara daring di manapun berada. Manfaat OSS lainnya adalah :

1. Mempermudah pengurusan berbagai perizinan berusaha baik prasyarat untuk melakukan usaha (izin terkait lokasi, lingkungan, dan bangunan), izin usaha, maupun izin operasional untuk kegiatan operasional usaha di tingkat pusat ataupun daerah dengan mekanisme pemenuhan komitmen persyaratan izin

2. Memfasilitasi pelaku usaha untuk terhubung dengan semua *stakeholder* dan memperoleh izin secara aman, cepat dan *real time*.
3. Memfasilitasi pelaku usaha dalam melakukan pelaporan dan pemecahan masalah perizinan dalam satu tempat.
4. Memfasilitasi pelaku usaha untuk menyimpan data perizinan dalam satu identitas berusaha (NIB).

Aturan baru ini tentu saja membawa dampak perubahan bagi DPMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu. Sehingga perlu melakukan banyak penyesuaian dan perbaikan. Terutama dari sisi aparaturnya, perlu ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan OSS, karena DPMPTSP merupakan lembaga penyelenggara OSS di daerah. Dengan mengikuti berbagai pelatihan diharapkan dapat mengimplementasikan dalam pendampingan OSS dengan baik sesuai aturan yang berlaku dan dapat memberikan pelayanan perizinan yang lebih baik kepada masyarakat.

Adapun perizinan yang belum dapat diproses melalui OSS ini, proses penerbitan perizinannya menggunakan aplikasi SiCantik. SiCantik merupakan Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terintegrasi untuk Publik yang fungsi utamanya adalah untuk menyederhanakan proses perizinan. SiCANTIK sendiri adalah aplikasi berbasis *web* yang nantinya akan terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS) untuk perizinan berusaha maupun layanan lain yang dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Perumusan tujuan dan sasaran digunakan dalam penyusunan rencana strategis perangkat daerah, yang mana merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Adapun Tujuan yang telah dirumuskan dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Meningkatkan investasi di Kabupaten Kapuas Hulu.

Tujuan 1 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu diarahkan pada upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja yang telah dicapai saat ini, meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan, meningkatkan kompetensi aparatur, dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kerja yang telah dimiliki.

Tujuan 2 : Meningkatkan investasi di Kabupaten Kapuas Hulu diarahkan pada upaya untuk meningkatkan fungsi perencanaan penanaman modal, mengoptimalkan promosi dan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan, mengoptimalkan proses perizinan penanaman modal, dan meningkatkan fungsi pengendalian investasi.

Berdasarkan masing-masing tujuan yang telah disepakati maka dibuat sasaran untuk kuantifikasi lebih lanjut dan lebih teknis yang dapat dikelola pencapaiannya. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program Perangkat Daerah.

Adapun sasaran yang telah dirumuskan dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas PMPTSP Kab Kapuas Hulu;

2. Meningkatkan kualitas pelayanan yang diselenggarakan DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu;
3. Meningkatkan realisasi investasi di Daerah.

Sasaran 1 : Meningkatkan akuntabilitas kinerja DPMPTSP Kab Kapuas Hulu diarahkan pada upaya meningkatkan predikat nilai evaluasi SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu secara bertahap, yang mana untuk kepentingan tersebut didukung oleh program :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

Selanjutnya Sasaran 2 : Meningkatkan Kualitas pelayanan yang diselenggarakan DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu diarahkan pada upaya meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan di bidang penanaman modal, yang mana didukung dengan 2 program, yaitu :

1. Program Pelayanan Penanaman Modal;
2. Program Pengelolaan Data dan sistem Informasi Penanaman Modal.

Kemudian Sasaran 3 : Meningkatkan realisasi investasi di Daerah diarahkan pada upaya meningkatkan nilai realisasi investasi di daerah baik Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing, yang mana didukung dengan 3 (tiga) program, yaitu :

1. Program Promosi Penanaman Modal;
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
3. Program Pengendalian Penanaman Modal.

Keterkaitan antara tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu dalam masa periode Renstra (2016-2021) serta indikator kerjanya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 3.1

Tujuan dan sasaran DPMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu periode Renstra (2016-2021)

| NO. | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR TUJUAN / SASARAN | TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN | | | | | |
|-----|---|---|--|--|------|------|------|------|------|
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. | Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas Pelayanan publik Dinas Penanaman Modal dan PTSP | Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP | Predikat SAKIP | CC | CC | CC | B | B | BB |
| | | Meningkatkan Kualitas pelayanan publik Dinas Penanaman Modal dan PTSP | Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) | 80 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| 2. | Meningkatkan investasi di Kabupaten Kapuas Hulu | Meningkatkan realisasi investasi di Daerah | Nilai Realisasi Investasi PMDN (Milyar rupiah) | 112 | 139 | 173 | 226 | 299 | 398 |

Tabel diatas menunjukkan indikator predikat SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2022 ditargetkan berpredikat "BB". Sedangkan indikator Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) tahun 2022 ditargetkan dengan nilai Baik (80 poin), serta indikator nilai realisasi investasi ditargetkan sebesar 398 Milyar.

3.3. Program dan Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di tahun 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu menetapkan 5 (lima) program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Program ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi perkantoran, meningkatnya efektivitas dan efisiensi operasional kantor, serta meningkatnya profesionalisme aparatur. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota kemudian dijabarkan dalam beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang terdiri dari :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terdiri atas beberapa sub kegiatan yaitu :
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah,
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD,
 - c) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD,
 - d) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD,
 - e) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD,
 - f) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD,
 - g) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, yang terdiri atas beberapa sub kegiatan, yaitu :
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN,
 - b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN,
 - c) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD,
 - d) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD,
 - e) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD,
 - f) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan,
 - g) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD,
 - h) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, yang terdiri atas beberapa sub kegiatan, yaitu :
 - a) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD,
 - b) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD.

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, yang terdiri atas beberapa sub kegiatan, yaitu :
 - a) Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai,
 - b) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya,
 - c) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian,
 - d) Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian,
 - e) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai,
 - f) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi,
 - g) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan,
 - h) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, yang terdiri atas beberapa sub kegiatan, yaitu :
 - a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor,
 - b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor,
 - c) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga,
 - d) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan,
 - e) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan,
 - f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD,
 - g) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD,
 - h) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, yang terdiri dari beberapa sub kegiatan :
 - a) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan,
 - b) Pengadaan Mebel,

- c) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya,
 - d) Pengadaan Aset Tak Berwujud,
 - e) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya,
 - f) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya,
 - g) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari beberapa sub kegiatan, yaitu :
- a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat,
 - b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik,
 - c) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor,
 - d) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari beberapa sub kegiatan, yaitu :
- a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan,
 - b) Pemeliharaan Mebel,
 - c) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya,
 - d) Pemeliharaan Aset Tak Berwujud,
 - e) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya,
 - f) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya,
 - g) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya,

2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Program pengembangan iklim penanaman modal bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan iklim penanaman modal agar kondusif dan berdaya saing sehingga dapat meningkatkan minat investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Kapuas Hulu. Program ini dapat dijabarkan dalam beberapa kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri atas sub kegiatan :
 - a) Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal,
 - b) Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.
2. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota yang terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :
 - a) Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota,
 - b) Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota.

3. Program Promosi Penanaman Modal

Program ini bertujuan untuk mendorong kegiatan promosi penanaman modal agar dapat berjalan efektif, lancar dan efisien. Program ini dapat dijabarkan dalam beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang terdiri dari :

1. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, yang terdiri dari sub kegiatan :
 - a) Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal,
 - b) Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota.

4. Program Pelayanan Penanaman Modal

Hasil yang diharapkan dari program Pelayanan Penanaman Modal adalah

memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam kepengurusan perizinan dan non perizinan. Program pelayanan penanaman modal ini dapat dijabarkan dalam beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang terdiri dari :

1. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota, yang terdiri dari sub kegiatan :
 - a) Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik,
 - b) Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal,
 - c) Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan,
 - d) Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah.

5. Program Pengendalian Penanaman Modal

Program pengendalian penanaman modal bertujuan untuk mendorong tertib administrasi bagi para pelaku usaha yang berinvestasi di Kabupaten Kapuas Hulu khususnya dalam menyampaikan laporan perkembangan penanaman modal. Program ini kemudian dijabarkan dalam kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, yang terdiri dari sub kegiatan :
 - a) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal,
 - b) Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal,
 - c) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal.

6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Program ini bertujuan untuk mengelola data dan informasi penanaman modal sehingga dapat disajikan dan digunakan oleh pemangku kepentingan dan kebijakan baik di daerah maupun provinsi. Program ini dapat dijabarkan dalam kegiatan dan sub

kegiatan :

1. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, yang terdiri dari sub kegiatan :
 - a) Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Suatu program adalah kumpulan proyek-proyek yang berhubungan dan dirancang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang harmonis dan secara integrasi untuk mencapai sasaran kebijaksanaan tersebut secara keseluruhan. Program merupakan unsur pertama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan. Melalui program maka segala bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk direalisasikan. Untuk itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu merumuskan 6 (enam) Program yang akan dilaksanakan agar Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022 akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk direalisasikan guna pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun program-program tersebut adalah :

1. *Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota*

Program ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi perkantoran, meningkatnya efektivitas dan efisiensi operasional kantor, serta meningkatnya profesionalisme aparatur. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota kemudian dijabarkan dalam beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang terdiri dari :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terdiri atas beberapa sub kegiatan yaitu :
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah,
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD,
 - c) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD,
 - d) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD,
 - e) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD,

- f) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD,
 - g) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, yang terdiri atas beberapa sub kegiatan, yaitu :
- a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN,
 - b) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD,
 - c) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD,
 - d) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD,
 - e) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan,
 - f) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD,
 - g) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, yang terdiri atas beberapa sub kegiatan, yaitu :
- a) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD,
 - b) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD.
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, yang terdiri atas beberapa sub kegiatan, yaitu :
- a) Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai,
 - b) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya,
 - c) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian,
 - d) Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian,
 - e) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai,
 - f) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi,

- g) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan,
 - h) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, yang terdiri atas beberapa sub kegiatan, yaitu :
- a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor,
 - b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor,
 - c) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga,
 - d) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan,
 - e) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan,
 - f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD,
 - g) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD,
 - h) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, yang terdiri dari beberapa sub kegiatan :
- a) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan,
 - b) Pengadaan Mebel,
 - c) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya,
 - d) Pengadaan Aset Tak Berwujud,
 - e) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya,
 - f) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya,
 - g) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari beberapa sub kegiatan, yaitu :

- a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat,
 - b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik,
 - c) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor,
 - d) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari beberapa sub kegiatan, yaitu :
- a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan,
 - b) Pemeliharaan Mebel,
 - c) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya,
 - d) Pemeliharaan Aset Tak Berwujud,
 - e) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya,
 - f) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya,
 - g) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya,

2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Program pengembangan iklim penanaman modal bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan iklim penanaman modal agar kondusif dan berdaya saing sehingga dapat meningkatkan minat investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Kapuas Hulu. Program ini dapat dijabarkan dalam beberapa kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri atas sub kegiatan :
 - a) Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal,

- b) Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.
- b. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota yang terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :
 - a) Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota,
 - b) Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota.

3. Program Promosi Penanaman Modal

Program ini bertujuan untuk mendorong kegiatan promosi penanaman modal agar dapat berjalan efektif, lancar dan efisien. Program ini dapat dijabarkan dalam beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang terdiri dari :

- a. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, yang terdiri dari sub kegiatan :
 - a) Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal,
 - b) Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota.

4. Program Pelayanan Penanaman Modal

Hasil yang diharapkan dari program Pelayanan Penanaman Modal adalah memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam kepengurusan perizinan dan non perizinan. Program pelayanan penanaman modal ini dapat dijabarkan dalam beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang terdiri dari :

- a. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota, yang terdiri dari sub kegiatan :
 - a) Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik,
 - b) Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal,

- c) Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan,
- d) Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah.

5. Program Pengendalian Penanaman Modal

Program pengendalian penanaman modal bertujuan untuk mendorong tertib administrasi bagi para pelaku usaha yang berinvestasi di Kabupaten Kapuas Hulu khususnya dalam menyampaikan laporan perkembangan penanaman modal. Program ini kemudian dijabarkan dalam kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, yang terdiri dari sub kegiatan :
 - a) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal,
 - b) Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal,
 - c) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal.

6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Program ini bertujuan untuk mengelola data dan informasi penanaman modal sehingga dapat disajikan dan digunakan oleh pemangku kepentingan dan kebijakan baik di daerah maupun provinsi. Program ini dapat dijabarkan dalam kegiatan dan sub kegiatan :

- a. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, yang terdiri dari sub kegiatan :
 - a) Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

Indikasi pendanaan program dan kegiatan Dinas PMPTSP didasarkan kepada program dan kegiatan yang efeknya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat atau *stakeholder*. Rumusan rencana program dan kegiatan

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Kapuas Hulu Tahun 2022 dan perkiraan maju tahun 2023 sebagaimana tercantum
pada tabel berikut :

Tabel 4.1

**RUMUSAN RENCANA KERJA, PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU 2023
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAPUAS HULU**

| Kode | | | | | Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju 2023 | | |
|--------|------------|---------|----------|--------------|---|--|--------------------|-----------------|---------------|------------------------|---------------|-----------------|---------------------|------------------------|---------------|
| Urusan | Sub Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | | | Lokasi | Belanja Operasi | Belanja Modal | Target Capaian Kinerja | Pagu | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Pagu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 12 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | Kab. Kapuas Hulu | 7.029.514.146 | 543.000.000 | | 7,471,218,684 | DAK /DAU | | | 8,218,340,552 |
| 2 | 18 | | | | PENANAMAN MODAL | Nilai Realisasi Investasi | Kab. Kapuas Hulu | 7.029.514.146 | 543.000.000 | 412 Milyar | 7,471,218,686 | DAK /DAU | | 416,12 Milyar | 8,218,340,554 |
| 2 | 18 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Predikat SAKIP OPD | Kab. Kapuas Hulu | 4.497.701.426 | 543.000.000 | BB (77) | 4.497.701.426 | DAU | | BB (78) | 4.947.471.568 |
| 2 | 18 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen perencanaan, penganggaran yang benar dan tepat waktu | Kab. Kapuas Hulu | 267.112.000 | | 5 dokumen | 267.112.000 | DAU | | 5 dokumen | 293.823.200 |
| 2 | 18 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen | Kab. Kapuas Hulu | 48.836.000 | - | 2 dokumen | 48.836.000 | DAU | | 2 dokumen | 53.719.600 |
| 2 | 18 | 01 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah dokumen | Kab. Kapuas Hulu | 4.235.000 | - | 1 dokumen | 4.235.000 | DAU | | 1 dokumen | 4.658.500 |
| 2 | 18 | 01 | 2.01 | 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah dokumen | Kab. Kapuas Hulu | 4.235.000 | - | 1 dokumen | 4.235.000 | DAU | | 1 dokumen | 4.658.500 |

| Kode | | | | | Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju 2023 | |
|--------|------------|---------|----------|--------------|--|--|--------------------|-----------------|---------------|------------------------|---------------|-----------------|---------------------|------------------------|
| Urusan | Sub Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | | | Lokasi | Belanja Operasi | Belanja Modal | Target Capaian Kinerja | Pagu | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja |
| 2 | 18 | 01 | 2.01 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah dokumen | Kab. Kapuas Hulu | 4.235.000 | - | 1 dokumen | 4.235.000 | DAU | 1 dokumen | 4.658.500 |
| 2 | 18 | 01 | 2.01 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah dokumen | Kab. Kapuas Hulu | 4.235.000 | - | 1 dokumen | 4.235.000 | DAU | 1 dokumen | 4.658.500 |
| 2 | 18 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja | Jumlah dokumen | Kab. Kapuas Hulu | 109.600.000 | - | 1 dokumen | 109.600.000 | DAU | 1 dokumen | 120.560.000 |
| 2 | 18 | 01 | 2.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen | Kab. Kapuas Hulu | 91.736.000 | - | 2 dokumen | 91.736.000 | DAU | 2 dokumen | 100.909.600 |
| 2 | 18 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Prosentase penyerapan anggaran | | 2.436.834.424 | - | 95% | 2.436.834.424 | DAU | 95% | 2.680.517.867 |
| 2 | 18 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah bulan dibayarkan gaji dan tunjangan PNS | Kab. Kapuas Hulu | 2.209.626.724 | - | 12 bulan | 2.209.626.724 | DAU | 12 bulan | 2.430.589.396 |
| 2 | 18 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah bulan dibayarkan honor penatausahaan keuangan | Kab. Kapuas Hulu | 172.278.700 | - | 9 orang | 172.278.700 | DAU | 9 orang | 189.506.570 |
| 2 | 18 | 01 | 2.02 | 04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah dokumen | Kab. Kapuas Hulu | 26.558.000 | - | 1 dokumen | 26.558.000 | DAU | 1 dokumen | 29.213.800 |
| 2 | 18 | 01 | 2.02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | Jumlah dokumen | Kab. Kapuas Hulu | 8.042.000 | - | 1 dokumen | 8.042.000 | DAU | 1 dokumen | 8.846.200 |

| Kode | | | | | Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju 2023 | |
|--------|------------|---------|----------|--------------|---|---|--------------------|-----------------|---------------|--------------------------------|-------------|-----------------|---------------------|------------------------|
| Urusan | Sub Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | | | Lokasi | Belanja Operasi | Belanja Modal | Target Capaian Kinerja | Pagu | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja |
| 2 | 18 | 01 | 2.02 | 06 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah dokumen | Kab. Kapuas Hulu | 4.235.000 | | 1 dokumen | 4.235.000 | DAU | 1 dokumen | 4.658.500 |
| 2 | 18 | 01 | 2.02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah dokumen | Kab. Kapuas Hulu | 8.052.000 | - | 1 dokumen | 8.052.000 | DAU | 1 dokumen | 8.857.200 |
| 2 | 18 | 01 | 2.02 | 08 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah dokumen | Kab. Kapuas Hulu | 8.042.000 | - | 1 dokumen | 8.042.000 | DAU | 1 dokumen | 8.846.200 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 18 | 01 | 2.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah dokumen administrasi barang milik negara | Kab. Kapuas Hulu | 6.820.000 | - | 2 dokumen | 6.820.000 | DAU | 2 dokumen | 7.502.000 |
| 2 | 18 | 01 | 2.03 | 01 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah dokumen | Kab. Kapuas Hulu | 3.410.000 | - | 1 dokumen | 3.410.000 | DAU | 1 dokumen | 3.751.000 |
| 2 | 18 | 01 | 2.03 | 05 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah dokumen | Kab. Kapuas Hulu | 3.410.000 | - | 1 dokumen | 3.410.000 | DAU | 1 dokumen | 3.751.000 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 18 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Prosentase kehadiran ASN dalam 1 tahun | Kab. Kapuas Hulu | 278.934.000 | - | 93% | 278.934.000 | DAU | 93,50% | 306.827.400 |
| 2 | 18 | 01 | 2.05 | 01 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah sarana dan prasarana disiplin pegawai | Kab. Kapuas Hulu | 30.250.000 | - | 1 set mesin absen finger print | 30.250.000 | DAU | - | - |
| 2 | 18 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah pakaian dinas | Kab. Kapuas Hulu | 27.200.000 | | 32 stel | 27.200.000 | DAU | 32 stel | 29.920.000 |

| Kode | | | | | Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju 2023 | |
|--------|------------|---------|----------|--------------|--|--|--------------------|-----------------|---------------|------------------------|-------------|-----------------|---------------------|------------------------|
| Urusan | Sub Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | | | Lokasi | Belanja Operasi | Belanja Modal | Target Capaian Kinerja | Pagu | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja |
| 2 | 18 | 01 | 2.05 | 03 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Tersedianya data pegawai | Kab. Kapuas Hulu | 8.400.000 | - | 1 dokumen | 8.400.000 | DAU | 1 dokumen | 9.240.000 |
| 2 | 18 | 01 | 2.05 | 04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Terlaksananya sistem informasi pegawai | Kab. Kapuas Hulu | 5.700.000 | - | 1 dokumen | 5.700.000 | DAU | 1 dokumen | 6.270.000 |
| 2 | 18 | 01 | 2.05 | 05 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah dokumen | Kab. Kapuas Hulu | 5.700.000 | - | 32 dokumen | 5.700.000 | DAU | 32 dokumen | 6.270.000 |
| 2 | 18 | 01 | 2.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah pegawai yang mengikuti diklat | Kab. Kapuas Hulu | 68.160.000 | - | 10 orang | 68.160.000 | DAU | 10 orang | 74.976.000 |
| 2 | 18 | 01 | 2.05 | 10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi | Kab. Kapuas Hulu | 65.364.000 | - | 10 orang | 65.364.000 | DAU | 10 orang | 71.900.400 |
| 2 | 18 | 01 | 2.05 | 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek | Kab. Kapuas Hulu | 68.160.000 | - | 10 orang | 68.160.000 | DAU | 10 orang | 74.976.000 |
| 2 | 18 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Prosentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah | Kab. Kapuas Hulu | 385.511.001 | - | 70 item | 385.511.001 | DAU | 69 item | 424.062.101 |
| 2 | 18 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah item komponen instalasi listrik | Kab. Kapuas Hulu | 51.022.000 | - | 12 item | 51.022.000 | DAU | 12 item | 56.124.200 |
| 2 | 18 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah item peralatan dan perlengkapan kantor | Kab. Kapuas Hulu | 59.746.000 | - | 55 item | 59.746.000 | DAU | 55 item | 65.720.600 |

| Kode | | | | | Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju 2023 | |
|--------|------------|---------|----------|--------------|--|---|--------------------|-----------------|---------------|--|-------------|-----------------|---|------------------------|
| Urusan | Sub Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | | | Lokasi | Belanja Operasi | Belanja Modal | Target Capaian Kinerja | Pagu | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja |
| 2 | 18 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah item perlatan rumah tangga | Kab. Kapuas Hulu | 15.000.000 | - | 3 lusin gelas minum harian, 3 lusin gelas tamu, 2 unit dispenser air | 15.000.000 | DAU | 1 unit magiccom, 3 unit dispenser panas dingin, | 16.500.000 |
| 2 | 18 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah item barang cetakan | Kab. Kapuas Hulu | 57.743.000 | - | 15 item | 57.743.000 | DAU | 15 item | 63.517.300 |
| 2 | 18 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah item bahan bacaan | Kab. Kapuas Hulu | 11.000.000 | - | 5 item | 11.000.000 | DAU | 5 item | 12.100.000 |
| 2 | 18 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Daerah | Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD daerah | Kab. Kapuas Hulu | 143.000.000 | - | 50 kali | 143.000.000 | DAU | 50 kali | 157.300.000 |
| 2 | 18 | 01 | 2.06 | 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Terlaksananya penatausahaan arsip dinamis SKPD | Kab. Kapuas Hulu | 24.000.000 | - | terkelolanya arsip dinamis SKPD | 24.000.000 | DAU | terkelolanya arsip dinamis SKPD | 26.400.000 |
| 2 | 18 | 01 | 2.06 | 11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Terlaksananya dukungan pelaksanaan SPBE | Kab. Kapuas Hulu | 24.000.000 | - | tersedianya dukungan SPBE | 24.000.000 | DAU | tersedianya dukungan SPBE | 26.400.000 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 18 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Prosentase sarana prasarana kantor disediakan | Kab. Kapuas Hulu | 80.450.000 | 543.000.000 | 100% | 623.450.000 | DAU | 100% | 685.795.000 |
| 2 | 18 | 01 | 2.07 | 02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas/opersional disediakan | Kab. Kapuas Hulu | - | - | 0 unit | - | DAU | 4 unit motor | 65.000.000 |

| Kode | | | | | Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju 2023 | |
|--------|------------|---------|----------|--------------|--|--|--------------------|-----------------|---------------|---|-------------|-----------------|--|------------------------|
| Urusan | Sub Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | | | Lokasi | Belanja Operasi | Belanja Modal | Target Capaian Kinerja | Pagu | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja |
| 2 | 18 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel | Jumlah mebel disediakan | Kab. Kapuas Hulu | - | 265.000.000 | 1 meja rapat oval besar, 40 kursi rapat direksi, 6 kursi ess IV ,40 kursi staf, 20 meja staf, 6 set rak arsip besi | 265.000.000 | DAU | 10 buah rak arsip, 10 unit filling kabinet, 3 unit kursi ruang tunggu, 3 set kursi/sofa ruang tamu | 291.500.000 |
| 2 | 18 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan dan mesin lainnya tersedia | Kab. Kapuas Hulu | - | 278.000.000 | 2 unit AC standing, 10 unit AC split, 1 unit LCD 50", 4 kamera CCTV tambahan, 2 unit PC all in 1, 6 unit laptop, 3 unit printer | 278.000.000 | DAU | 10 unit laptop, 6 unit AC split, 2 unit PC all in 1 | 305.800.000 |
| 2 | 18 | 01 | 2.07 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah sarana prasarana disediakan | Kab. Kapuas Hulu | 35.000.000 | - | 1 paket desain interior gedung dan ruang pelayanan | 35.000.000 | DAU | - | 38.500.000 |
| 2 | 18 | 01 | 2.07 | 11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah sarana prasarana pendukung disediakan | Kab. Kapuas Hulu | 45.450.000 | - | 1 paket instalasi & penambahan daya listrik, 1 paket pemindahan jaringan PDAM, 1 paket pemindahan jaringan Telkom & Indihome | 45.450.000 | DAU | - | 49.995.000 |
| | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | | | | | Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju 2023 | |
|--------|------------|---------|----------|--------------|--|--|--------------------|-----------------|---------------|------------------------|-------------|-----------------|---------------------|------------------------|
| Urusan | Sub Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | | | Lokasi | Belanja Operasi | Belanja Modal | Target Capaian Kinerja | Pagu | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja |
| 2 | 18 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Prosentase tersedianya jasa penunjang urusan | Kab. Kapuas Hulu | 385.440.000 | - | 100% | 385.440.000 | DAU | 100% | 423.984.000 |
| 2 | 18 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah surat terkirim | Kab. Kapuas Hulu | 2.640.000 | - | 200 buah | 2.640.000 | DAU | 200 buah | 2.904.000 |
| 2 | 18 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Terbayarnya tagihan listrik, air, telepon dan internet | Kab. Kapuas Hulu | 66.000.000 | - | 12 bulan | 66.000.000 | DAU | 12 bulan | 72.600.000 |
| 2 | 18 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Tersedianya jasa pelayanan umum kantor | Kab. Kapuas Hulu | 316.800.000 | - | 12 bulan | 316.800.000 | DAU | 12 bulan | 348.480.000 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 18 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Peosentase barang milik negara dalam kondisi baik | Kab. Kapuas Hulu | 113.600.000 | - | 35 unit | 113.600.000 | DAU | | 182.960.000 |
| 2 | 18 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas /operasional yang dibayarkan pajaknya | Kab. Kapuas Hulu | 61.600.000 | - | 15 unit | 61.600.000 | DAU | 20 unit | 67.760.000 |
| 2 | 18 | 01 | 2.09 | 05 | Pemeliharaan Mebel | Jumlah mebel yang dipelihara | Kab. Kapuas Hulu | - | - | 20 unit | - | DAU | 20 unit | 55.000.000 |
| 2 | 18 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara | Kab. Kapuas Hulu | 32.000.000 | - | 20 unit | 32.000.000 | DAU | 20 unit | 35.200.000 |
| 2 | 18 | 01 | 2.09 | 08 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara | Kab. Kapuas Hulu | - | - | 1 aset tak berwujud | - | DAU | 1 aset tak berwujud | - |

| Kode | | | | | Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju 2023 | |
|----------|------------|-----------|----------|--------------|--|--|--------------------|-----------------|---------------|------------------------|---------------|-----------------|---|------------------------|
| Urusan | Sub Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | | | Lokasi | Belanja Operasi | Belanja Modal | Target Capaian Kinerja | Pagu | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja |
| 2 | 18 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah gedung yang dipelihara | Kab. Kapuas Hulu | - | 1 gedung | - | DAU | 1 gedung | - | |
| 2 | 18 | 01 | 2.09 | 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah sarana prasarana gedung yang dipelihara | Kab. Kapuas Hulu | 20.000.000 | - | 1 prasarana pendukung | 20.000.000 | DAU | 1 paket pemeliharaan prasarama pendukung gedung | 25.000.000 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 18 | 02 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | Jumlah dokumen pengembangan iklim penanaman modal | Kab. Kapuas Hulu | 1.223.632.000 | | 1 dokumen | 1.223.632.000 | DAU | 1 dokumen | 1.345.995.200 |
| 2 | 18 | 02 | 2.01 | | Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota | Jumlah dokumen pengkajian/perencanaan /pengusulan | Kab. Kapuas Hulu | 350.000.000 | | 1 dokumen | 350.000.000 | DAU | 1 dokumen | - |
| 2 | 18 | 02 | 2.01 | 01 | Penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemufahan penanaman modal | Jumlah dokumen kebijakan dalam bentuk Perda/Perbup | Kab. Kapuas Hulu | 350.000.000 | | 1 dokumen | 350.000.000 | DAU | 1 dokumen | - |
| 2 | 18 | 02 | 2.01 | 02 | Evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal | Jumlah laporan evaluasi | Kab. Kapuas Hulu | - | | 1 laporan | - | DAU | 1 laporan | - |
| 2 | 18 | 02 | 2.02 | | Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen peta potensi | Kab. Kapuas Hulu | 873.632.000 | | 1 dokumen | 873.632.000 | DAU | 1 dokumen | 960.995.200 |
| 2 | 18 | 02 | 2.02 | 01 | Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen RUPM | Kab. Kapuas Hulu | 506.949.000 | | 1 dokumen | 506.949.000 | DAU | 1 dokumen | 557.643.900 |

| Kode | | | | | Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju 2023 | |
|--------|------------|---------|----------|--------------|---|--|--------------------|-----------------|---------------|------------------------|-------------|-----------------|---------------------|------------------------|
| Urusan | Sub Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | | | Lokasi | Belanja Operasi | Belanja Modal | Target Capaian Kinerja | Pagu | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja |
| 2 | 18 | 02 | 2.02 | 02 | Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen peta potensi/peluang investasi | Kab. Kapuas Hulu | 366.683.000 | | 1 dokumen | 366.683.000 | DAU | 1 dokumen | 403.351.300 |
| 2 | 18 | 03 | | | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | Jumlah minat investor | Kab. Kapuas Hulu | 302.349.000 | - | 2 minat | 302.349.000 | DAU | 2 minat | 332.583.900 |
| 2 | 18 | 03 | 2.01 | | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah laporan promosi penanaman modal | Kab. Kapuas Hulu | 302.349.000 | - | 2 laporan | 302.349.000 | DAU | 2 laporan | 332.583.900 |
| 2 | 18 | 03 | 2.01 | 01 | Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal | Jumlah dokumen strategi promosi | Kab. Kapuas Hulu | 80.000.000 | | 1 dokumen | 80.000.000 | DAU | 1 dokumen | 88.000.000 |
| 2 | 18 | 03 | 2.01 | 02 | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah event promosi diikuti | Kab. Kapuas Hulu | 222.349.000 | - | 3 event | 222.349.000 | DAU | 3 event | 244.583.900 |
| 2 | 18 | 04 | | | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | Prosentase dokumen perizinan diterbitkan sesuai SOP | Kab. Kapuas Hulu | 432,791,160 | - | 100% | 432,791,160 | DAU | 100% | 476,070,276 |
| 2 | 18 | 04 | 2.01 | | Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Rata-rata penyelesaian perizinan diterbitkan | Kab. Kapuas Hulu | 432,791,160 | - | 3-5 hari | 432,791,160 | DAU | 3-5 hari | 476,070,276 |

| Kode | | | | | Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju 2023 | |
|--------|------------|---------|----------|--------------|---|--|--------------------|-----------------|---------------|------------------------|-------------|-----------------|---------------------|------------------------|
| Urusan | Sub Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | | | Lokasi | Belanja Operasi | Belanja Modal | Target Capaian Kinerja | Pagu | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja |
| 2 | 18 | 04 | 2.01 | 01 | Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Prosentase pelaku usaha terlayani sesuai SOP | Kab. Kapuas Hulu | 340,350,200 | - | 100% | 340,350,200 | DAU | 100% | 374,385,220 |
| 2 | 18 | 04 | 2.01 | 02 | Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal | Prosentase pelaku usaha yang memenuhi komitmen | Kab. Kapuas Hulu | 34.585.800 | - | 90% | 34.585.800 | DAU | 90% | 38.044.380 |
| 2 | 18 | 04 | 2.01 | 03 | Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan | Prosentase pengaduan ditindaklanjuti sesuai SOP | Kab. Kapuas Hulu | 28.927.580 | | 100% | 28.927.580 | DAU | 100% | 31.820.338 |
| 2 | 18 | 04 | 2.01 | 04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah | Jumlah dokumen penetapan | Kab. Kapuas Hulu | 28.927.580 | | 1 dokumen | 28.927.580 | DAU | 1 dokumen | 31.820.338 |
| 2 | 18 | 05 | | | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | Prosentase kepatuhan perusahaan menyampaikan LKPM | Kab. Kapuas Hulu | 535.991.500 | - | 50% | 535.991.500 | DAK/DAU | 50% | 589.590.650 |
| 2 | 18 | 05 | 2.01 | | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah perusahaan yang menyampaikan LKPM | Kab. Kapuas Hulu | 535.991.500 | - | 50 perusahaan | 535.991.500 | DAK/DAU | 50 perusahaan | 589.590.650 |
| 2 | 18 | 05 | 2.01 | 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal | Jumlah perusahaan yang wajib LKPM | Kab. Kapuas Hulu | 180.380.200 | - | 50 perusahaan | 180.380.200 | DAU | 50 perusahaan | 198.418.220 |

BAB V

PENUTUP

Dalam rangka menjamin terlaksananya program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022 serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah- kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2022 dengan efektif dan efisien.
2. Renja Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan sebagai langkah awal dalam penyusunan anggaran Tahun 2022, dimana Renja Tahun 2022 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran.
3. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, seluruh aparatur secara berjenjang, wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja Tahun 2022.
4. Renja Tahun 2022 berlaku sejak tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan evaluasi dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, transparansi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Adapun catatan penting yang menjadi saran bagi perbaikan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu ke depan berdasarkan hasil evaluasi kinerja DPMPSTP Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2020 adalah :

1. Agar lebih teliti didalam menginput data monitoring kinerja, agar tidak terjadi kesalahan. Serta menjaga sesuaian data kinerja.
2. Melengkapi data pendukung dalam melaksanakan evaluasi kinerja seperti undangan rapat, daftar hadir dan notulen rapat.
3. Seluruh aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu agar meningkatkan intergritas, disiplin dan profesionalisme kerja, serta menerapkan sistem, prosedur, dan mekanisme kerja dan standar pelayanan yang jelas, tertib, efisien dan efektif, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan pemanfaatan teknologi dan informasi yang memadai, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi.

Merealisasikan perencanaan yang telah disusun tentu tidak lepas dari dukungan semua pihak terkait. Upaya pembenahan sistem, pengembangan SDM serta peningkatan sarana dan prasarana pelayanan sesuai tuntutan tugas dan harapan masyarakat merupakan suatu tugas besar yang harus segera direalisasikan. Untuk itu, dukungan semua pihak dalam perbaikan sistem dan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu akan sangat diperlukan demi terwujudnya akuntabilitas kinerja, kualitas pelayanan yang lebih baik dan meningkatnya realisasi investasi di daerah.